

**ANALISIS PENGARUH FAKTOR INTERNAL
DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP
PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE
TAHUN 2015-2019)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

KHAIRUNNISA YURITA RAMADHANI

NIM. 12040116140063

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Khairunnisa Yurita Ramadhani
Nomor Induk Mahasiswa : 12040116140063
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH FAKTOR
INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL
TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL KERJA
PADA BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA (PERIODE TAHUN 2015-2019)**
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, MS

Semarang, 16 Oktober 2020

Pembimbing,



Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, MS

NIP. 195809271986031019

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Khairunnisa Yurita Ramadhani
Nomor Induk Mahasiswa : 12040116140063
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH FAKTOR
INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL
TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL KERJA
PADA BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA (PERIODE TAHUN 2015- 2019)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 November 2020 Tim penguji :

1. Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, MS  (.....)
2. Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si  (.....)
3. Banatul Hayati, S.E., M.Si.  (.....)

Mengetahui, Wakil Dekan I,



Firmansyah, SE., M.Si, Ph.D.

NIP. 195811221984031002

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Khairunnisa Yurita Ramadhani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE TAHUN 2015-2019)”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 20 September 2020

Yang membuat pernyataan,



Khairunnisa Yurita Ramadhani

NIM. 12040116140063

ABSTRACT

Working capital financing is one of the financing carried out by Islamic Commercial Banks. Working capital financing is a productive financing that is in line with the commandment in Islam to increase equity, however, the volume of working capital financing is actually lower and very reflective when compared to consumption financing at Islamic Commercial Banks. This research was conducted to determine the effect of Third Party Funds (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Bank Indonesia Syariah Certificates and inflation on working capital financing at Islamic Commercial Banks.

The data that used in this study are monthly data from 2015 to 2019. The data are obtained from Bank Indonesia reports and Islamic Banking Statistics from the OJK. The analysis technique used in this study is multiple linear regression using EViews 9.

The results of this study indicate that simultaneously, Third Party Funds (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Bank Indonesia Syariah Certificates and inflation have a significant effect on working capital financing. Partially, Third Party Funds (TPF) have a positive effect on working capital, while the Capital Adequacy Ratio (CAR) and Non Performing Financing (NPF) have a significant negative effect on the financing. Financing to Deposit Ratio (FDR), Bank Indonesia Sharia Certificates and inflation have no effect on working capital financing of Islamic Commercial Banks. The regression estimation results show that the predictive ability of the model is 95.4%, while the remaining 4.6% is influenced by other factors outside the model.

Keywords: Third Party Funds (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Bank Indonesia Syariah Certificates, working capital financing

ABSTRAK

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan produktif yang sejalan dengan perintah dalam Islam untuk meningkatkan pemerataan, namun volume pembiayaan modal kerja justru lebih rendah dan sangat berfluktuatif jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumsi pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan inflasi terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan dari 2015 hingga 2019. Data diperoleh dari laporan Bank Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda menggunakan EViews 9.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah. Secara parsial, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif pada pembayaran modal kerja di Bank Umum Syariah, sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja Bank Umum Syariah. Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa kemampuan prediksi model adalah 95.3%, sedangkan 4,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Kata kunci: *Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Pembiayaan Modal Kerja*

MOTTO

*"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri"*

(QS Al-Ankabut: 6)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS Al-Baqarah: 286)

"If it meant to be, it will be. But still, do as best as you can do"

"Don't expect anything if you don't work for it"

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak, Ibu dan Adikku Tersayang

Beserta keluarga dan teman Saya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa yang telah senantiasa melimpahkan segala berkah dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ANALISIS PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE TAHUN 2015-2019)”, sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi Program Sarjana (S1) Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi berlangsung, penulis menghadapi segala hambatan yang telah terselesaikan berkat bantuan, saran, bimbingan, do’a, serta dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa., MS selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Darwanto, S.E., M.Si., M. Sy. selaku Kepala Program Studi Ekonomi Islam dan Dosen Wali atas segala ilmu, dukungan, dan motivasi yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis

4. Bapak dan Ibu tercinta, Wahyu Nugraha dan Sri Lastari Darmastuti, yang selalu memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, nasehat, dan motivasi yang sangat besar kepada penulis di setiap langkah dan proses selama penyelesaian skripsi.
5. Adik tercinta, Rafi Arya Nugraha, yang telah selalu memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, canda tawa, dan motivasi yang sangat besar.
6. Keluarga kontrakan dan lambe turah, yang selalu menemani penulis setiap harinya serta memberikan semangat dan dukungan. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, serta canda dan tawanya selama ini.
7. Sahabat – sahabat penulis, Cinta, Eris, Sakina, Rio, Galuh, Yona, dan sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan semua. Terima kasih sudah terus menghibur, menyemangati, dan mendukung penulis.
8. Sahabat penulis, Rifa, yang sudah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan hafalan Al-Quran, hadist, dan kaidah fiqh.
9. Keluarga Ekonomi Islam 2016 yang menjadi tempat tumbuh dan berkembang selama proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan masa perkuliahan.
10. Keluarga biro Acara Kelompok Studi Ekonomi Islam 2018 yang banyak memberi kebersamaan dan pengalaman berharga selama menjalani perkuliahan.
11. Keluarga besar Kelompok Studi Ekonomi Islam 2018 yang memberi penulis pengalaman berharga selama menjalani proses perkuliahan.

12. Keluarga departemen Minat dan Bakat Himpunan Ekonomi Islam 2018 yang banyak memberi kebersamaan dan pengalaman berharga selama menjalani perkuliahan.
13. Keluarga besar Himpunan Ekonomi Islam 2018 yang telah memberi banyak pengalaman berharga selama menjalani proses perkuliahan.
14. Keluarga KKN Desa Taruman tahun 2019 yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam mengejar skripsi.
15. Seluruh teman, kerabat, dan segala pihak yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar penulis dapat belajar menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 20 September 2020

Penulis,



Khairunnisa Yurita Ramadhani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
1.5 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Intermediasi Keuangan	23
2.2 Perbankan Syariah	25
2.3 Pembiayaan pada Perbankan Syariah.....	29
2.4 Pembiayaan Modal Kerja	34
2.5 Faktor Internal	38
2.5.1 Dana Pihak Ketiga (DPK).....	38

2.5.2	Capital Adequacy Ratio (CAR)	39
2.5.3	Financing to Deposit Ratio (FDR)	40
2.5.4	Non Performing Financing (NPF).....	42
2.6	Faktor Eksternal	43
2.6.1	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).....	43
2.6.2	Inflasi.....	44
2.7	Penelitian Terdahulu.....	46
2.8	Hipotesis	51
2.8.1	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS).....	51
2.8.2	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS).....	52
2.8.3	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)	53
2.8.4	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)	54
2.8.5	Pengaruh SBIS terhadap terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)	55
2.8.6	Pengaruh Inflasi terhadap terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)	56
2.9	Kerangka Pemikiran	57
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	59
3.1.1	Variabel Penelitian	59
3.1.2	Definisi Operasional Variabel.....	60
3.2	Populasi dan Sampel	63

3.3	Jenis dan Sumber Data	65
3.4	Metode Pengumpulan Data	65
3.5	Metode Analisis Data	66
3.5.1	Uji Asumsi Klasik	66
3.5.2	Uji Regresi Linear Berganda.....	68

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Objek Penelitian.....	72
4.1.1	Pembiayaan pada Bank Umum Syariah.....	72
4.1.2	Dana Pihak Ketiga (DPK).....	75
4.1.3	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	76
4.1.4	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	77
4.1.5	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	79
4.1.6	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).....	81
4.1.7	Inflasi.....	82
4.2	Analisis Data	83
4.2.1	Uji Asumsi Klasik.....	83
4.2.2	Analisis Uji Regresi Linear Berganda.....	88
4.3	Inrerpretasi Hasil	97
4.3.1	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS).....	97
4.3.2	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)	100
4.3.3	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)	102
4.3.4	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)	105

4.3.5	Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS).....	108
4.3.6	Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS).....	110
BAB V KESIMPULAN		
5.1.	Kesimpulan.....	113
5.2.	Keterbatasan	114
5.3.	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA		117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Volume Pembiayaan Modal Kerja pada Tahun 2015 - 2019	5
Tabel 1. 2 DPK, NPF, CAR, FDR, Inflasi, SBIS dan Pembiayaan Modal Kerja pada BUS Periode 2015-2019	12
Tabel 2. 1 Daftar Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.....	27
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	62
Tabel 4. 1 Perkembangan Pembiayaan menurut Akad pada BUS tahun 2015 - 2019.....	73
Tabel 4. 2 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson	84
Tabel 4. 3 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson setelah Perbaikan	85
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	86
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser.....	88
Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	89
Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda setelah Koreksi	89
Tabel 4. 8 Nilai Koefisien Determinan	92
Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik F.....	93
Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik t Parsial	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional	6
Gambar 1. 2 Perbandingan Rasio Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah dan Kredit Modal Kerja pada Bank Umum Konvensional	7
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	58
Gambar 4. 1 Perkembangan Pembiayaan pada Bank Umum Syariah	74
Gambar 4. 2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah.....	76
Gambar 4. 3 Perkembangan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) pada Bank Umum Syariah.....	77
Gambar 4. 4 Perkembangan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) pada Bank Umum Syariah.....	79
Gambar 4. 5 Perkembangan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Umum Syariah.....	80
Gambar 4.6 Perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah	82
Gambar 4. 7 Perkembangan Inflasi di Indonesia	82
Gambar 4. 8 Hasil Uji Normalitas	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data	122
Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas	124
Lampiran 3 Hasil Uji Autokorelasi sebelum Perbaikan.....	125
Lampiran 4 Hasil Uji Autokorelasi setelah Perbaikan	126
Lampiran 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	127
Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinearitas	128
Lampiran 7 Hasil Uji Regresi sebelum Perbaikan	129
Lampiran 8 Hasil Uji Regresi setelah Perbaikan	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan penduduk Islam di Indonesia pada tahun 2010 sebesar 207.176.162 jiwa atau sekitar 87% dari jumlah populasi di Indonesia (BPS, 2010) dan perkiraan penduduk Islam di Indonesia menurut data *Globalreligiustfuture* mencapai 229,62 juta jiwa pada tahun 2020 (dikutip dari [https://data books.katadata.co.id](https://data.books.katadata.co.id), pada tanggal 5 Oktober 2020).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam, tidaklah heran jika penduduknya membutuhkan suatu lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah Islam, salah satunya adalah Bank Syariah. Bank Syariah tentunya berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada pelaksanaan bank syariah yang didasari oleh sistem hukum Islam sedangkan bank konvensional tidak didasari prinsip Islam. Hal tersebut mendorong perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia selama dua dekade terakhir ini hingga memiliki pangsa pasar yang cukup besar.

Kemunculan perbankan syariah sudah berjalan lebih dari dua dekade ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Bank Muamalat merupakan Bank Umum Syariah (BUS) pertama dan menjadi pionir

dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia dapat berdiri dengan landasan dasar UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang pada waktu itu masih menggunakan istilah “bank bagi hasil” untuk menyebut bank berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia terus meningkat dan semakin menunjukkan eksistensinya. Terlebih saat Bank Muamalat mampu bertahan pada krisis moneter di tahun 1998 ditengah banyaknya bank konvensional yang mengalami kebangkrutan (Nugroho, 2017). Hal itu berdampak pada kuantitas bank syariah yang kian meningkat pada periode 1999 – 2007. Perbankan syariah pada periode 1999 – 2007 bertambah menjadi 3 institusi bank umum syariah, 19 unit usaha syariah dan 104 bank perkreditan rakyat syariah. Pemerintah akhirnya mengamandemen UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah guna percepatan atas pertumbuhan bank syariah di Indonesia.

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah sebagian besar berasal dari Unit Usaha Syariah yang berhasil untuk melakukan *spin-off*.

Momentum diamandemenkannya UU no.21 Tahun 2008 berhasil mendorong berdirinya sejumlah bank syariah di Indonesia. Kini, bank syariah di Indonesia jumlahnya terus bertambah tiap tahunnya. Berdasarkan data yang

diunggah oleh Statistik Perbankan Syariah, hingga Juli 2019 tercatat sebanyak 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Hingga 2019, perbankan syariah berhasil meraih pangsa pasar sebesar 6,01%. Angka tersebut merupakan angka terbesar daripada bulan-bulan sebelumnya. Sebanyak 65% pangsa pasar bank syariah dikuasai oleh BUS dan 32,36% merupakan UUS dan sisanya adalah BPRS. Selama empat tahun terakhir, 2016-2019, 14 BUS di Indonesia mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 11% lebih tinggi dibandingkan UUS (Rustam, 2020). Bank Umum Syariah sendiri pada kuartal terakhir tahun 2019 berhasil menghimpun dana sebesar 26.553.798 Miliar Rupiah.

Perkembangan bank syariah yang terus meningkat tidak lepas dari peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi berperan untuk menghubungkan pihak yang memiliki *surplus* dana dengan mereka yang membutuhkan dana melalui fasilitas pembiayaan oleh BUS (Budisantoso, Totok, dan Nuritomo, 2014). Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh BUS guna mendorong ekonomi sektor riil adalah pembiayaan produktif, salah satunya adalah pembiayaan modal kerja.

Peran perbankan syariah dalam menggerakkan sektor riil, salah satunya melalui pembiayaan modal kerja, sejalan dengan perintah dari Allah SWT. Dalam Al- Quran pun dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Surat Al-Hasyr ayat 7 merupakan salah satu ayat Al-Quran mengenai produksi yang menjelaskan mengenai harta untuk tidak beredar di antara orang-orang kaya saja. Hal ini sejalan dengan konsep dari pembiayaan modal kerja di mana dapat distribusikan untuk sektor manapun dan memiliki efek domino bagi perekonomian dan masyarakat luas.

Pembiayaan pada modal kerja berguna bagi masyarakat yang sedang melakukan usaha untuk meningkatkan produksinya sehingga dapat menjalankan usahanya dengan normal dan lancar. Pembiayaan modal kerja diberikan berupa modal kerja untuk memenuhi peningkatan produksi suatu usaha agar dapat lebih berkembang dan nantinya dapat meningkatkan perekonomian sektor riil. Pembiayaan modal kerja menjadi salah satu alternatif untuk permodalan usaha karena dapat mengurangi beban para pengusaha dengan adanya sistem bagi hasil berupa revenue sharing (Antonio, 2001).

Perkembangan dari pembiayaan modal kerja pada tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 1.1. Berdasarkan Tabel 1.1, volume pembiayaan modal kerja terus mengalami peningkatan. Volume pembiayaan modal kerja pada tahun 2015 sebesar 63.640 Miliar Rupiah dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 79.986 Miliar Rupiah.

Tabel 1. 1

Volume Pembiayaan Modal Kerja pada Tahun 2015 – 2019 (Miliar Rupiah)

Tahun	Volume Pembiayaan
2015	63640
2016	68420
2017	72188
2018	72425
2019	79986

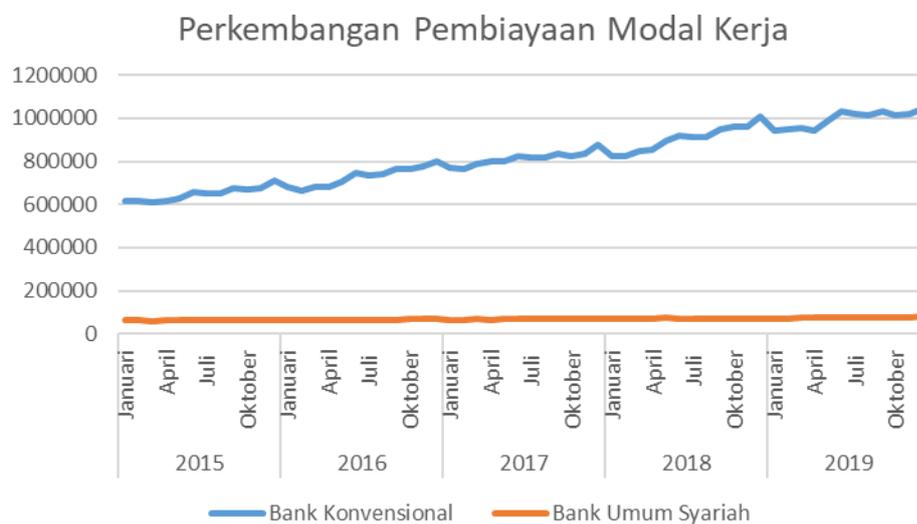
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan

Namun, dapat dilihat juga dari Gambar 1.1 bahwa angka pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kredit modal kerja yang disalurkan oleh Bank Umum

Konvensional. Volume pembiayaan modal kerja pada BUS tidak pernah lebih dari 80.000 Miliar Rupiah sedangkan tingkat pembiayaan kredit modal kerja yang dilakukan Bank Umum Konvensional selalu lebih besar dari 600.000 Miliar Rupiah.

Gambar 1. 1

Perkembangan Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional



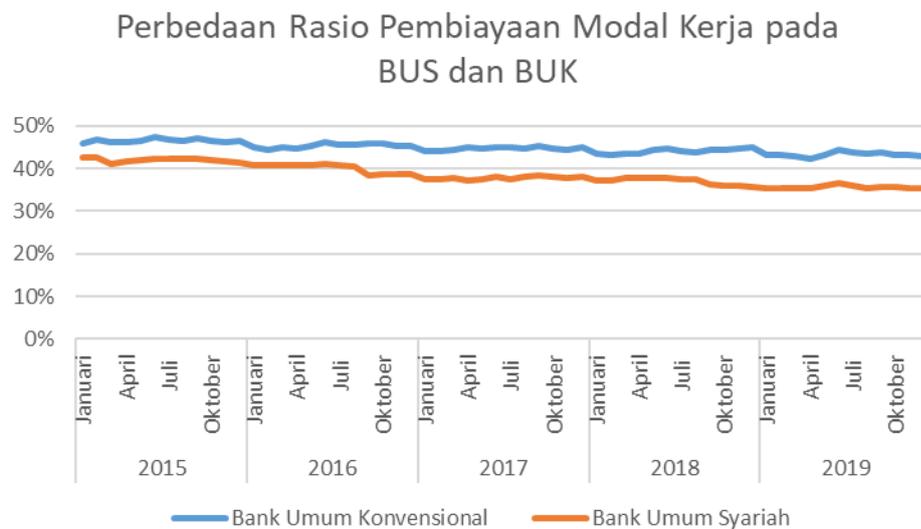
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK

Berdasarkan pada gambar 1.2 tidak hanya secara volume saja bank umum syariah masih kalah. Namun, secara rasio pembiayaan modal kerja pada bank umum syariah juga masih di bawah kredit modal kerja pada bank konvensional. Rasio pembiayaan/kredit modal kerja merupakan persentase jumlah penyaluran bank terhadap pembiayaan/kredit modal kerja dibandingkan dengan pembiayaan/kredit pada sektor lain. Hal ini menunjukkan, porsi kredit modal kerja yang dilakukan bank konvensional lebih banyak dibanding bank umum syariah.

Padahal, bank umum syariah juga seharusnya meningkatkan pembiayaan modal kerja karena dianjurkan dalam Islam

Gambar 1. 2

Perbandingan Rasio Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah dan Kredit Modal Kerja pada Bank Umum Konvensional



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK

Volume dan rasio pembiayaan modal kerja yang masih kalah dibandingkan dengan kredit modal kerja menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Indonesia atau pelaku usaha yang masih mengambil kredit dari bank konvensional. Padahal, penggunaan kredit dalam Islam tidak diperbolehkan karena dalam pengembalian pinjaman tersebut terdapat tambahan atau bunga yang harus dibayarkan. Seperti yang disabdakan Rasulullah;

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا

Artinya: Setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat maka itu maka itu termasuk salah satu bentuk riba. (HR. Al-Baihaqi)

Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam yang mengharamkan riba. Sudah banyak ayat dalam Al-Quran mengenai pengharaman riba, salah satunya adalah surah Ali – Imran ayat 130, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Kondisi kredit bank konvensional yang masih mendominasi di Indonesia sebenarnya cukup disayangkan. Perbedaan antara kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah masih lebih dari sekitar 10% jika dihitung secara persentase. Perbankan Syariah seharusnya bisa memperkecil *gap* tersebut karena Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Bank Syariah masih memiliki ruang untuk meningkatkan potensinya, termasuk dalam penyaluran pembiayaan modal kerja.

Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan modal kerja agar kedepannya bisa lebih meningkat. Bank Umum Syariah (BUS) sebagai lembaga intermediasi keuangan

harus memperhatikan berbagai faktor internal maupun eksternal dan aspek apa saja yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat. Faktor internal bank yang akan diteliti antara lain berkaitan dengan persepsi bank terhadap prospek usaha debitur, rasio keuangan perusahaan perbankan seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Faktor eksternal bank berkaitan dengan kondisi perekonomian yang akan diteliti, seperti tingkat inflasi, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber dana yang dibutuhkan oleh BUS dalam menjalankan operasionalnya termasuk untuk menyalurkan pembiayaan. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dikumpulkan oleh Bank dari pihak ketiga yaitu masyarakat (Rivai, 2007). Volume DPK yang berhasil dihimpun bank akan sangat menentukan banyaknya dana yang dapat dikembangkan oleh perbankan termasuk dalam penyaluran pembiayaan. Semakin besar volume DPK yang ada, maka semakin besar pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan (Indrawati, 2017).

Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan tidak terlepas dari pertimbangan mengenai risiko dan ancaman dari pembiayaan bermasalah yang ada. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu rasio yang menggambarkan risiko tersebut. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah (Pratami, 2011). Jika semakin tinggi tingkat NPF maka

akan semakin rendah jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank (Astarini, 2016). Pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan pembiayaan karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar.

Tingkat likuiditas dari bank juga menjadi salah satu pertimbangan bank dalam penyaluran pembiayaan karena menunjukkan kemampuan suatu bank untuk membayar kewajiban yang bersifat jangka pendek. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai rasio yang menggambarkan tingkat likuiditas dari Bank Syariah. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap DPK (Suryani, 2012). Menurut Nurrochman (2016), peningkatan nilai FDR menunjukkan kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah juga semakin meningkat atau berpengaruh positif.

Faktor internal lain yang mempengaruhi pembiayaan adalah permodalan. Salah satu rasio yang menggambarkan permodalan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2005). Semakin tinggi CAR menunjukkan bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak kepada pelaku usaha (Afsari, 2018).

Selain faktor internal terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah, salah satunya adalah inflasi. Inflasi adalah suatu proses di mana harga secara umum terus mengalami peningkatan secara umum dan terus menerus (Dahlan, 2014). Jaya (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa inflasi memiliki hubungan yang negatif terhadap pembiayaan modal kerja dikarenakan peningkatan inflasi yang terjadi akan direspon oleh Bank Indonesia dengan menerapkan kebijakan uang ketat yaitu salah satunya dengan bank membatasi pembiayaan.

Faktor terakhir adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Dahlan, 2014). Bank Syariah mengalokasikan dananya ke SBIS karena memiliki risiko yang terlalu tinggi. Hal tersebut mengakibatkan SBIS memiliki pengaruh negatif atau berbanding terbalik terhadap pembiayaan (Muhammad, 2018).

Pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pembiayaan tidak selalu sama dengan teori yang ada ataupun penelitian terdahulu. Tentunya terdapat perbedaan apabila kita lihat dari data yang ada. Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat perkembangan dari masing-masing variabel independen dan dependen. Terlihat juga terdapat beberapa perbedaan pengaruh variabel independen terhadap dependen yang tidak sesuai dengan teori ataupun penelitian terdahulu yang sudah ada.

Tabel 1. 2

**DPK, NPF, CAR, FDR, Inflasi, SBIS dan Pembiayaan Modal Kerja pada
BUS Periode 2015-2019**

Tahun	Triwulan	Pembiayaan Modal Kerja (Miliar Rupiah)	DPK (Miliar Rupiah)	NPF (%)	CAR (%)	FDR (%)	Inflasi (%)	SBIS (Miliar Rupiah)
2015	I	60613	11905344	5,49%	14,43%	89,15%	6,38%	8050
	II	63558	11960189	5,09%	14,09%	92,56%	7,26%	9040
	III	64048	12986843	5,14%	15,14%	90,82%	6,83%	8810
	IV	63640	15476183	4,84%	15,01%	88,03%	3,35%	9130
2016	I	62547	15514846	5,35%	14,90%	87,52%	4,45%	8858
	II	65049	14986106	5,68%	14,72%	89,32%	3,45%	8458
	III	65907	17781110	4,67%	15,43%	86,43%	3,07%	8163
	IV	68420	18543305	4,42%	16,63%	85,99%	3,02%	8585
2017	I	67136	19231378	4,61%	16,98%	83,53%	3,61%	7720
	II	70753	19864575	4,47%	16,42%	82,69%	4,37%	7192
	III	71520	20611024	4,41%	16,16%	80,12%	3,72%	6495
	IV	72188	21338958	4,77%	17,91%	79,65%	3,61%	6280
2018	I	71759	21979384	4,56%	18,47%	77,63%	3,40%	6275
	II	71475	22447445	3,83%	20,59%	78,68%	3,12%	7188
	III	71917	23041972	3,82%	21,25%	79,17%	2,88%	6994
	IV	72425	24067983	3,26%	20,39%	77,92%	3,13%	7683
2019	I	73099	24730868	3,44%	19,85%	78,38%	2,48%	7225
	II	77491	25287577	3,36%	19,56%	79,74%	3,28%	7470
	III	77988	26200227	3,32%	20,39%	81,56%	3,39%	8130
	IV	79986	26553798	3,23%	20,59%	77,91%	2,72%	8947

Berdasarkan Tabel 1.2, data dari objek penelitian secara triwulan tahun 2015-2019. Perkembangan nilai yang ada cukup berfluktuatif. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa ternyata masih terjadi *phenomena gap* dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.

Volume Dana Pihak Ketiga (DPK) pada data triwulan periode 2015-2019 terus mengalami kenaikan kecuali pada triwulan II tahun 2016. Dana Pihak Ketiga

(DPK) mengalami penurunan dari 15,514,846 Miliar Rupiah menjadi sebesar 14,986,106 Miliar Rupiah, namun jumlah volume pembiayaan modal kerja justru meningkat padahal secara teori harusnya Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan. *Phenomena Gap* lainnya terjadi pada triwulan IV tahun 2015 dan triwulan I tahun 2016 di mana volume Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat tetapi volume dari pembiayaan modal kerja justru menurun. Hal yang sama terjadi pada triwulan I dan II tahun 2018 dengan menurunnya pembiayaan modal kerja di tengah meningkatnya volume Dana Pihak Ketiga (DPK).

Menurut teori, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan modal kerja. Beberapa kali saat rasio *Non Performing Financing* (NPF) meningkat, jumlah volume pembiayaan modal kerja yang diberikan justru meningkat. Keadaan yang demikian terjadi pada triwulan III tahun 2015, triwulan IV tahun 2017, dan triwulan I tahun 2019. Kasus lain juga terjadi saat *Non Performing Financing* (NPF) menurun, volume pembiayaan juga ikut menurun seperti saat tiwulan I dan II tahun 2018. Tahun 2017 triwulan I rasio NPF sebesar 4,77% lalu turun menjadi 4,56% pada triwulan I tahun 2018 dan turun lagi menjadi 3,83%. Hal itu justru berbanding lurus pada pembiayaan modal kerja yang awalnya sebesar 72.188 Miliar Rupiah, turun menjadi 71.759 Miliar Rupiah, dan turun lagi menjadi 71.475 Miliar Rupiah.

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada triwulan I tahun 2015 mengalami penurunan dari 14,43% menjadi 14,09% namun volume pembiayaan modal kerja justru meningkat dari 60.613 Miliar Rupiah menjadi 63.558 Miliar

Rupiah. Volume pembiayaan meningkat ditengah turunnya rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan adanya korelasi negatif, padahal seharusnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki korelasi positif terhadap pembiayaan. Kasus yang sama juga terjadi berturut-turut pada triwulan IV tahun 2018, triwulan I dan II tahun 2019 dengan nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terus menurun dari 21,25% menjadi 20,39% lalu 19,85% dan menjadi 19,56% pada triwulan II tahun 2019, sementara volume pembiayaan terus meningkat dari 72.425 Miliar Rupiah meningkat menjadi 73,099 Miliar Rupiah dan di triwulan II tahun 2019 menjadi 77.491 Miliar Rupiah. Tidak hanya saat rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menurun dan pembiayaan justru meningkat, tetapi terdapat juga kondisi saat rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) meningkat sedangkan pembiayaan justru menurun. Kondisi tersebut terjadi saat tahun 2018 pada triwulan I dan II, di mana rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) meningkat menjadi 18,47% dan 20,59% dan pembiayaan menurun dari 72,188 menjadi 71,759 dan 71,475.

Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan. Nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara berturut mengalami penurunan dari triwulan III tahun 2016 hingga triwulan IV pada tahun 2017. Setahun lebih nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan namun volume pembiayaan justru terus mengalami peningkatan. Hal ini tentunya menimbulkan *phenomena gap*.

Berdasarkan Tabel 1.1, nilai inflasi pada triwulan II tahun 2015 mengalami kenaikan dari 6,38% menjadi 7,26% tetapi volume pembiayaan mengalami peningkatan juga dari pembiayaan dari 60,613 Miliar Rupiah menjadi 63,558

Miliar Rupiah. Keadaan yang sama saat inflasi turun dan pembiayaan turun terjadi saat triwulan II tahun 2019 turun. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori di mana nilai Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Apabila inflasi menurun maka pembiayaan meningkat atau apabila inflasi meningkat maka pembiayaan akan menurun.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh negatif atau berbanding terbalik terhadap pembiayaan modal kerja, namun kondisinya tidak selalu demikian. Pada periode I tahun 2016, nilai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menurun menjadi 8.8858 Miliar Rupiah namun nilai pembiayaan juga turun dari 63.640 Miliar Rupiah menjadi 62.547 Miliar Rupiah. Kondisi lainnya adalah saat nilai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) meningkat juga diikuti volume pembiayaan yang ikut meningkat. Kondisi tersebut terjadi pada tahun 2018 triwulan IV. Nilai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) meningkat dari 6.994 Miliar Rupiah menjadi 7.683 Miliar Rupiah, volume pembiayaan juga meingkat dari 71.917 Miliar Rupiah menjadi 72.425 Miliar Rupiah.

Penelitian mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Adzimatunur et al (2015), Astarini et al (2016), Kusnianingrum (2016), Nurrochman (2016), Prayuningrum dan Hasib (2017), Indrawati (2017), dan Utami (2018) sepakat menunjukkan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan. Penelitian lain

menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memiliki pengaruh dilakukan oleh Suprihatin (2017), Ovami (2018).

Penelitian yang dilakukan Kusnianingrum (2016), Nurmanilla (2016), Nurrochman (2016), Prayuningrum dan Hasib (2017), menghasilkan *Non performing financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Penelitian lain yang dilakukan Adzimatnur et al (2015) dan Astarini et al (2016), *Non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif. *Non performing financing* (NPF) dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2011), Wahab (2014), Asri (2016), tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan didukung oleh penelitian Adzimatnur et al (2015), Astarini et al. (2016), Kusnianingrum (2016) dan Nurrochman (2016). Hasil yang berbeda didapatkan oleh Wahab (2014) dan Asri (2016) dengan hasil *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. Penelitian lain dilakukan oleh Giannini (2013) dan Almuna (2013) di mana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan dalam penelitian yang dilakukan Dyatma (2015), Asri (2016) dan Nurmanilla (2016). Berdasarkan penelitian Afsari (2018) dan Kusnianingrum (2016), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh positif. Menurut Pratami (2011), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Astarini et al (2016) dan Muhammad (2018) menunjukkan inflasi memiliki pengaruh negatif. Terhadap pembiayaan Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Utami (2018), di mana inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan. Penelitian lainnya menunjukkan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan, dilakukan oleh Dahlan (2014), Nurmanilla (2016), dan Suprihatin (2017).

Penelitian mengenai pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebelumnya sudah dilakukan oleh Prayuningrum dan Hasib (2017) dan Dyatma (2015) dengan hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhammad (2018) dengan hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan modal kerja Bank Syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan dalam penelitian Asri (2016).

Pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah selama periode 2015-2019 masih kalah jauh jika dibandingkan dengan kredit modal kerja yang disalurkan oleh bank umum konvensional. Selain dari keadaan tersebut, masih banyak juga perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya mengenai tema yang serupa. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat *phenomena gap* yang terjadi pada objek penelitian yang diambil oleh penulis. Tidak hanya *phenomena gap*, namun

terdapat juga *research gap* yang terjadi. Masih banyak perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan *phenomena gap* dan *research gap* menjadi latar belakang penulis untuk mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE TAHUN 2015-2019)”**

1.2 Rumusan Masalah

Pembiayaan selalu dikaitkan dengan bisnis atau usaha, karena dalam bisnis, terutama bisnis yang baru memulai, dibutuhkan dana yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Meningkatnya perkembangan usaha baik UMKM ataupun usaha besar akan berpengaruh kepada perekonomian sektor riil. Bank Syariah dalam hal ini dapat membantu dengan menyalurkan pembiayaan modal kerja bagi usaha-usaha yang membutuhkan sehingga dapat berkembang dan akhirnya akan meningkatkan perekonomian sektor riil. Pentingnya meningkatkan sektor riil juga terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7 di mana harta tidak boleh beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

Namun, sangat disayangkan pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah masih sangat kecil, padahal pembiayaan guna kepentingan produktif dalam Islam sangat diutamakan. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan bank konvensional. Volume pembiayaan modal kerja hanya berkisar 60.000 Miliar Rupiah hingga 80.000 Miliar Rupiah, sedangkan kredit modal kerja dari bank konvensional selalu berjumlah lebih dari 600.000 Miliar Rupiah. Bank Umum Syariah seharusnya masih memiliki potensi yang besar untuk

meningkatkan pembiayaannya ditengah penduduk Indonesia yang mayoritasnya adalah umat Islam.

Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan modal kerja pada BUS. Faktor-faktor yang diteliti pada penelitian ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal bank, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), inflasi, dan SBIS. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor tersebut terhadap pembiayaan perbankan Syariah pada sektor modal kerja.

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka didapatkan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)?
3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)?
4. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)?
5. Bagaimana pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)?

6. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)
2. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)
3. Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)
4. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)?
5. Menganalisis pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)?
6. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan modal

kerja pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi industri dan praktisi di bidang perbankan syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait strategi pengembangan, khususnya dalam tingkat pembiayaan modal kerja pada perbankan syariah di Indonesia.

b. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha untuk mengajukan pembiayaan modal kerja untuk usahanya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi pelaku usaha bahwa faktor apa saja yang mempengaruhi bank untuk memberikan pembiayaan modal kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibahas dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang yang menjadi masalah dalam pemilihan topik atau tema yaitu analisis faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan modal kerja pada BUS, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai telaah pustaka dengan terdiri dari tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang mendasari tulisan ini, sehingga mampu mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memberikan deskripsi tentang definisi operasional dan variabel penelitian, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini telah diuraikan tentang hasil dari bahasan yang berisi seputar deskripsi dari objek yang diteliti, penjelasan atau pembahasan mengenai hasil perhitungan atau analisis data dengan metode regresi linier berganda (*Ordinary Least Square*) serta interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penulis serta saran-saran yang dapat diberikan kepada perusahaan dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Intermediasi Keuangan

Intermediasi adalah penghubung, sedangkan intermediator merupakan pialang atau pihak perantara yang menghubungkan para pelaku transaksi sehingga memudahkan siklus perdagangan barang dan jasa (Algoud, 2004). Intermediasi yang dimaksud di sini merupakan lembaga perantara atau penghubung dalam bidang keuangan yang memberikan pelayanan dan jasa. Intermediasi keuangan adalah proses yang dilakukan oleh bank dalam mengambil dana dari deposan yang memiliki *surplus* dana dan kemudian meminjamkannya kepada peminjam. *Surplus* dana bisa didapatkan dari sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga) untuk tujuan penyediaan dana untuk unit ekonomi defisit (Rivai, 2007).

Fungsi intermediasi keuangan muncul sebagai pihak perantara untuk mengakomodir kebutuhan pemilik dana (*household/net savers*) dengan pengguna dana (*corporations/ net borrowers*) yang sebelumnya menimbulkan tingginya biaya monitoring, biaya likuiditas dan risiko harga (*price risk*) karena adanya informasi asimetri antara kedua belah pihak tersebut (Saunders dan Garnet, 2008). Lembaga intermediasi keuangan memiliki fungsi dan peranan, yaitu:

1. Berfungsi sebagai perantara (*broker*)

2. Mengubah aset (*asset transformer*)
3. Berperan sebagai pengawas (*monitoring*)
4. Berperan menghasilkan informasi (*information producer*)

Lembaga intermediasi dalam sistem keuangan di Indonesia terdiri dari Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan reksa dana. Lembaga keuangan yang tidak melakukan fungsi intermediasi antara lain perusahaan sekuritas, perusahaan broker, dan dealer pasar modal.

Bank Umum Syariah merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Fungsi BUS sebagai lembaga intermediasi, khususnya dalam penyaluran dana, mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Bank memiliki peran dalam perekonomian karena merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter pada level ekonomi makro, sedangkan pada level mikro ekonomi merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu (Koch dan MacDonald, 2000).

Bank Umum Syariah (BUS) tidak lepas dari memfokuskan diri untuk menyalurkan dana. Hal ini berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dana dan pengguna dana. Sumber dana yang diperoleh perbankan guna biaya operasional bank berasal dari masyarakat untuk masyarakat sehingga secara moral pun bank harus menyalurkan kembali dana tersebut melalui pembiayaan secara tepat (Taswan, 2010). Selain itu, fungsi intermediasi juga

dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan. Efisiensi bank merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kinerja (*performance*) suatu bank dan akhirnya juga akan sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efektifitas kebijakan moneter.

2.2 Perbankan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mendeskripsikan bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 1 angka 7). Secara umum, bank adalah lembaga yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang (A. Karim, 2010). Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah untuk memperlancar mekanisme ekonomi terutama di sektro riil melalui berbagai aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) (Ascarya, 2007).

Perbankan Syariah memiliki tujuan untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Guna mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah berpegang pada prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*) (Burhanuddin, 2010). Bank Syariah yang memegang prinsip syariah pun memiliki dimensi keberhasilan meliputi keberhasilan dunia dan keberhasilan akhirat yang sangat memerhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil (Ascarya, 2007).

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah menjadi isu penting dalam operasional bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank.

Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu (Rivai, 2007):

1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. BUS disebut juga dengan *full branch*, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. BUS dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya (Ismail, 2011).

Bank Muamalat menjadi BUS pertama yang berdiri di Indonesia dan menjadi awal mula perkembangan bank syariah di Indonesia. Bank Umum Syariah (BUS) terus mengalami perkembangan hingga kini secara kuantitas telah terbentuk 14 BUS di Indonesia. Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia hingga 2020, terdiri dari:

Tabel 2. 1
Daftar Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia

PT. Bank Aceh Syariah	PT. Bank Syariah Mandiri
PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	PT. Bank Mega Syariah
PT. Bank Muamalat Indonesia	PT. Bank Panin Dubai Syariah
PT. Bank Victoria Syariah	PT. Bank Syariah Bukopin
PT. Bank BRI Syariah	PT. BCA Syariah
PT. Bank Jabar Banten Syariah	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
PT. Bank BNI Syariah	PT. Maybank Syariah Indonesia

Bank Umum Syariah dalam operasionalnya menerapkan beberapa akad pada produknya. Produk bank syariah sendiri terbagi menjadi empat, yaitu:

- Produk pendanaan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk giro dan tabungan, pinjaman (*qardh*) berbentuk giro dan tabungan, bagi

hasil (*mudharabah*) dalam bentuk tabungan, deposito dan obligasi serta sewa (*ijarah*) berbentuk obligasi.

- Produk pembiayaan meliputi pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) berbentuk pembiayaan investasi dan modal kerja, jual beli (*murabahah, salam, isthisna*) berbentuk dalam pembiayaan properti, sewa (*ijarah*) berbentuk sewa beli dan akuisisi aset serta pinjaman (*qardh*) berbentuk pembiayaan surat berharga.
- Produk jasa perbankan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk deposit, bagi hasil (*mudharabah*) berbentuk investasi terikat dan pola lain (*wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf*) berbentuk transfer dan kliring.
- Produk kegiatan sosial dalam bentuk pola pinjaman (*qardh*) yang diterapkan untuk dana talangan kepada nasabah dan sumbangan sektor usaha kecil.

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah. Secara struktur organisasi, UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat menjalankan usaha sebagai bank devisa atau non devisa. Sebagai unit kerja khusus UUS mempunyai tugas:

- Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah.

- Melakukan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah.
- Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah
- Melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.

3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.

2.3 Pembiayaan pada Perbankan Syariah

Perbankan Syariah memiliki fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana *surplus* dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002).

Bank Umum Syariah memiliki fungsi dan peranan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa keuangan syariah. Fungsi dan peranan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan terkait dengan bank syariah yang merupakan lembaga intermediasi keuangan. Hal ini lah yang mendasari BUS memiliki peran untuk memberikan fasilitas pembiayaan.

Pembiayaan juga didasari oleh Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Tolong menolong tersebut dapat diwujudkan melalui salah satunya adalah pembiayaan. Surah An-Nisa ayat 29, berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kalian.

Pembiayaan adalah penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak untuk memperolehnya (Arifin, 2006). Menurut UU No. 7 Tahun 1992, pembiayaan adalah “Penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.”

Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sifat penggunaannya, yaitu (Antonio, 2001):

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif menurut keperluannya dapat dibagi menjadi:

a. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah atau calon nasabah untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah, kebanyakan berupa kas, bahan baku, produksi atau operasional, gaji atau upah pegawai, dan biaya operasional lainnya. Pembiayaan modal kerja biasanya memiliki jangka waktu yang pendek.

b. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi guna penyediaan barang yang bermanfaat dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang digunakan dalam pembiayaan investasi adalah menengah hingga panjang. Pembiayaan investasi biasanya diberikan untuk pembelian aktiva tetap, pembiayaan proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaan, misalnya bangunan, mesin-mesin, alat-alat berat, kendaraan.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan ini biasanya berupa pemenuhan kebutuhan seperti kredit pembelian rumah, kendaraan bermotor, elektronik, dan lain-lain. Pembayaran kembali pembiayaan berupa angsuran, berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan dari objek yang dibiayainya.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro (Muhammad, 2005).

Secara makro dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat bertujuan untuk (Muhammad, 2005):

1. Peningkatan ekonomi umat di mana masyarakat yang sebelumnya tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya usaha yang kekurangan dana dapat terbantu dengan adanya pembiayaan untuk pengembangan usaha.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya pembiayaan bank yang bersifat produktif dapat memberi peluang untuk meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dana yang disalurkan dapat menambah usaha-usaha baru dan nantinya dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat mampu melakukan usaha produktif dan akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Pembiayaan dalam lingkup mikro dapat bertujuan untuk (Muhammad, 2005):

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya tambahan dana dapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan efektivitas usaha yang nantinya akan menghasilkan laba yang lebih besar.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya untuk menghasilkan laba maksimal, maka risiko juga harus diminimalkan. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

3. Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana.

2.4 Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja adalah modal yang diperlukan oleh suatu perusahaan membiayai seluruh operasional dari suatu usaha dan bukan digunakan untuk investasi. Suatu kegiatan usaha dapat berjalan sesuai rencana yang telah dibuat salah satunya dengan adanya bantuan dana yaitu berupa modal kerja. Modal kerja dibutuhkan guna meningkatkan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas agar laba yang dihasilkan dapat meningkat. Kegiatan jangka pendek seperti pembelian bahan baku, produksi atau operasional, gaji atau upah pegawai, dan biaya operasional lainnya biasanya didorong oleh adanya modal kerja dari perusahaan.

Modal kerja dibagi menjadi dua konsep utama yaitu modal kerja bersih (*net working capital*) dan modal kerja kotor (*gross working capital*). Modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurang utang lancar. Utang lancar terdiri dari utang dagang, utang wesel, utang bank jangka pendek dan utang lainnya. Modal kerja kotor merupakan semua aktiva lancar keseluruhan atau biasa disebut modal kerja. Modal ini terdiri dari kas, bank, piutang, persediaan, dan persediaan lainnya (A. Karim, 2010).

Modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi dua hal berdasarkan jenis penggunaannya yaitu (Riyanto, 2002):

1. Modal Kerja Permanen

Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan guna menjalankan operasional. Modal kerja ini dibutuhkan terus menerus untuk kelancaran usaha

2. Modal Kerja Variabel

Modal kerja variabel merupakan modal kerja yang jumlahnya tidak pasti atau terus berubah-ubah disesuaikan dengan perubahan keadaan.

Kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh usaha-usaha salah satunya bisa didapatkan melalui pembiayaan yang diberikan Bank Syariah. Bank Syariah sendiri sudah mempunyai produk pembiayaan khusus bagi para usaha yang membutuhkan modal kerja untuk kegiatan operasionalnya. Bank Syariah bahkan sudah merilis syarat dan ketentuan bagi calon nasabah yang dapat diakses di website masing-masing BUS. Bank Syariah dengan memberikan pembiayaan bagi kegiatan usaha perdagangan dapat membantu meningkatkan kinerja perekonomian.

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan atau nasabah untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku, siklus/perputaran usaha dan kebutuhan modal kerja lainnya (A. Karim, 2010). Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan dari pihak Bank Syariah.

Bank Umum Syariah dalam memberikan penyaluran pembiayaan biasanya memberikan syarat-syarat kepada calon nasabahnya dan melakukan penilaian atau seleksi apakah calon nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan. Calon nasabah yang dipilih biasanya yang memiliki keseriusan dan peluang yang baik kedepannya untuk terus mengembangkan usahanya. Hal itu dilakukan untuk meminimalkan risiko apabila calon nasabah tidak dapat memenuhi pembayaran sesuai kontrak yang sudah ditentukan atau akan menjadi pembiayaan bermasalah bagi bank.

Akad yang digunakan oleh setiap BUS untuk pembiayaan modal kerja bermacam-macam, namun kebanyakan bank syariah menggunakan akad *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah* untuk mekanisme pembiayaan modal kerja. Mekanisme pembiayaan modal kerja yang paling umum menggunakan akad-akad berikut, yaitu:

1. Akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* merupakan akad yang berbasis kemitraan antara pihak bank dan nasabah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Bank akan memberikan pembiayaan kepada nasabah namun tidak secara penuh karena dalam akad ini pembiayaan memang disediakan oleh kedua belah pihak tidak hanya oleh satu pihak seperti *mudharabah*. Bank Syariah akan membiayai sebagian kebutuhan modal kerja yang diperlukan Nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*gross profit and loss sharing*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Akad *Murabahah*

Akad ini merupakan akad yang paling populer digunakan dalam pembiayaan modal kerja (Sjahdenini, 2014). Akad ini digunakan apabila nasabah lebih banyak membutuhkan modal kerja berupa barang atau bahan baku dibandingkan kas. Mekanisme akad *murabahah* dilakukan dengan cara bank syariah terlebih dahulu membeli barang-barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah sebesar harga pokok lalu dijual kepada nasabah dengan keuntungan margin yang sudah disepakati sebelumnya. Akad ini dianggap paling memberikan pendapatan yang pasti untuk bank atau lebih mudah untuk dikontrol karena keuntungan margin ditentukan di awal bukan seperti akad *musyarakah* dan *mudharabah* yang disesuaikan dengan *profit* dan *loss sharing*.

3. Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan produk finansial syariah yang berbasis kemitraan seperti *musyarakah*. Berbeda dengan *musyarakah*, penyediaan dana dalam akad *mudharabah* dilakukan oleh satu pihak saja yaitu pihak shaibul mal atau pihak bank. Nasabah dan Bank melakukan perjanjian kerjasama *Mudharabah* (bagi hasil) dimana Bank bertindak sebagai Penyedia Dana dan Nasabah bertindak sebagai Pengelola Usaha. Besarnya Bagi Hasil (nisbah) dari Laba Usaha Nasabah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

2.5 Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang dapat dilihat dari kondisi internal dari BUS. Salah satunya meliputi kinerja keuangan BUS yang dapat dilihat melalui sumber pendanaan bank yaitu melalui penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan berbagai rasio keuangan seperti *Non Performing Financing* (NPF), *Financing Debt Rasio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

2.5.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan bentuk lainnya (Rivai, 2007). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank atau dana yang bersumber dari pihak ketiga dan dihimpun oleh sektor perbankan adalah dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan salah satu sumber dana yang paling diandalkan oleh bank.

Secara teknis, DPK pada bank syariah adalah berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah dan deposito *mudharabah*. Bank dapat memanfaatkan DPK ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Volume Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bank akan sangat menentukan volume dana yang dapat dikembangkan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan.

Semakin besar jumlah DPK yang ada, maka dana yang bisa disalurkan juga menjadi lebih banyak.

2.5.2 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan salah satu indikator dalam rasio solvabilitas. Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemampuan perusahaan perbankan membayar hutang jangka panjang dapat diukur dengan salah satunya CAR.

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2005). CAR menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank, semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi modal.

Modal menjadi salah satu faktor yang harus dimiliki bank untuk mengembangkan usaha dan menopang kemungkinan risiko dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif yang mengandung risiko serta untuk membiayai penanaman dalam aktiva lainnya. Fungsi intermediasi bank dapat dilaksanakan dengan optimal jika didukung permodalan yang memadai. Meskipun Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun sangat besar, namun jika

tidak diimbangi dengan tambahan modal maka bank akan terbatas dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan.

Perhitungan rasio dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat diperoleh dari perhitungan berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

2.5.3 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Rasio likuiditas merupakan kemampuan suatu bank untuk membayar kewajibannya pada jangka pendek dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap hutang lancarnya atau kewajiban jangka pendek. Islam sebelumnya juga sudah menyuruh umatnya untuk tidak meninggalkan hutang-hutangnya di dunia. Maka dari itu, dalam islam dapat dikatakan kemampuan membayar kewajiban sangat penting. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengenai membayar hutang. Dari Shuhaib Al Khoir, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُوفِّيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

Artinya: Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri. (HR. Ibnu Majah)

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, memenuhi permintaan kredit tanpa adanya

tanggungan, dan dapat membayar kembali semua deposit. Semakin baik tingkat likuiditas maka kinerja keuangan dari bank tersebut juga semakin baik.

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang menggambarkan tingkat likuiditas dari bank konvensional dengan mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan lalu dibagi dengan jumlah total penerimaan dana yang dimiliki. LDR digunakan sebagai indikator dalam menilai kesehatan keuangan dalam menjalankan operasional. Kemampuan sebuah bank dalam mendapatkan dan mempertahankan nasabah juga dapat tercermin dalam rasio LDR. Apabila penerimaan dana sebuah bank terus meningkat, maka sumber-sumber dana baru dan nasabah baru berhasil didapatkan.

Berbeda dengan Bank Konvensional, Bank Syariah tidak mengenal istilah kredit melainkan pembiayaan sehingga Bank Syariah menggunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* sebagai rasio yang menggambarkan tingkat likuiditas dari Bank Syariah. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan salah satu rasio yang menggambarkan tingkat likuiditas dari suatu bank syariah. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) (Suryani, 2012).

Perhitungan rasio dari *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dapat diperoleh dari perhitungan berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana yang Diterima Bank}} \times 100\%$$

2.5.4 *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) merefleksikan besarnya risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Bank syariah tidak mengenal istilah kredit (*loan*) karena tidak menganut konsep bunga seperti halnya bank konvensional, melainkan konsep bagi hasil maka istilah kredit dalam bank syariah diganti menjadi pembiayaan (*financing*), sehingga rasio *Non Performing Loan* (NPL) diganti menjadi *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah (Pratami, 2011). Semakin kecil rasio NPF semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank.

Non Performing Financing (NPF) mencerminkan pembiayaan-pembiayaan yang tidak memiliki performance yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet. Nilai NPF yang tinggi tentunya akan sangat berpengaruh terhadap operasional bank, sehingga tingkat (NPF) harus selalu dijaga. Tugas Bank Indonesia (BI) salah satunya adalah mempertahankan dan memelihara sistem perbankan yang sehat dan dapat dipercaya dengan tujuan menjaga perekonomian. Bank Indonesia selaku bank sentral dan pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan Bank, salah satunya dengan menetapkan tingkat maksimum yang tidak boleh dilewati NPF.

Perhitungan rasio dari *Non Performing Financing* (NPF) dapat diperoleh dari perhitungan berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.6 Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar lingkungan BUS. Faktor eksternal dapat meliputi kondisi perekonomian secara makro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) selaku kebijakan moneter dan inflasi sebagai salah satu faktor yang menggambarkan perekonomian Indonesia secara makro.

2.6.1 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebelumnya dikenal sebagai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah bukti Penitipan Dana berjangka pendek dengan prinsip akad yang digunakan adalah prinsip wadiah. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) disediakan oleh Bank Indonesia bagi perbankan syariah. Prinsip akad wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pihak yang memiliki dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. SWBI tidak diberlakukan lagi dan digantikan dengan SBIS sejak April 2008.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan penerbitan SBIS dalam rangka pengendalian moneter melalui instrumen operasi pasar

terbuka. SBIS dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah dengan akad ju'alah. Semua hal mengenai SBIS sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dilakukan secara mekanisme lelang dengan pihak yang dapat memiliki Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah BUS atau UUS. BUS atau UUS yang berhak untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) wajib memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Dahlan, 2014).

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki beberapa karakteristik yaitu satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berjangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan. Selain itu, SBIS diterbitkan tanpa warkat (*scriptless*), dapat diagunkan kepada Bank Indonesia, dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

2.6.2 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi adalah suatu proses di mana harga secara umum terus mengalami peningkatan dalam suatu waktu dan berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di

pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, dan akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang (Boediono, 1985).

Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa infasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di dunia sejak masa dahulu hingga sekarang, dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir. Menurutnya, inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan belangsung terus menerus. Al-Maqrizi mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya kedalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia (A. A. Karim, 2010).

Inflasi mengalami kenaikan apabila harga barang dan jasa di dalam negeri terjadi peningkatan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan nilai uang menjadi turun. Akhirnya inflasi akan berdampak pada pelaku bisnis karena menyebabkan biaya meningkat baik dari biaya produksi, transaksi atau biaya lainnya. Hal tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa.

Inflasi memberi pengaruh negatif terhadap daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat karena inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas ekonomi, investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan pendapatan di masa yang akan datang (Parakkasi, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Jaya, W, dan MK, 2015) menyatakan bahwa inflasi memiliki hubungan yang negatif terhadap pembiayaan modal kerja.

Terjadinya peningkatan pada inflasi akan direspon oleh Bank Indonesia dengan menerapkan *tight money policy* atau membatasi jumlah uang yang beredar dengan cara membatasi pemberian kredit dan pembiayaan. Dengan demikian ketika inflasi mengalami peningkatan maka akan menyebabkan penurunan pada pembiayaan modal kerja. Rumus untuk menghitung tingkat inflasi adalah:

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{Indeks Harga Konsumen (t)} - \text{Indeks Harga Konsumen (t-1)}}{\text{Indeks Harga Konsumen (t-1)}}$$

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai variabel dependen dan independen yang digunakan. Namun, penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja pada BUS belum begitu banyak untuk bisa ditemui. Maka dari itu penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh faktor eksternal dan faktor internal terhadap pembiayaan modal kerja di BUS.

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah pernah dilakukan oleh Muhammad (2018), Utami (2018), serta Prayuningrum and Hasib (2017). Selain penelitian tersebut, rata-rata penelitian lainnya menggunakan pembiayaan pada Bank Syariah secara luas. Lebih lengkapnya, penelitian terdahulu akan dijabarkan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
1	Andrean Muhammad. (2018). Pengaruh Instrumen Kebijakan Fiskal, Moneter Syariah, dan Makroekonomi terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah di Indonesia	Variabel Dependen: Rasio Pembiayaan modal kerja Variabel Independen: Indeks Produksi Industri, nilai tukar, sukuk negara, sertifikat BI, pasar uang antar bank syariah, inflasi	Vector Error Correction Model (VECM)	Dalam jangka panjang variabel indeks produksi industri, nilai tukar, dan sukuk negara berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel sertifikat bank Indonesia syariah, pasar uang antarbank syariah, dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio pembiayaan modal kerja.
2	Ulfa rizki Utami. (2018). <i>The Effect of Bank's Internal Factors Towards Micro Financing in Islamic Commercial Bank at Indonesia</i>	Variabel Dependen: Pembiayaan UMKM Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>rate of return</i> , inflasi.	Ordinary Least Square (OLS)	DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM. <i>Rate of return</i> berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Inflasi berpengaruh positif dengan koefisien yang lebih besar dibanding faktor lainnya terhadap pembiayaan bank syariah terhadap UMKM
3	Elzalina Jannati Prayuningrum. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja pada Perbankan	Variabel Dependen: Pembiayaan modal kerja Variabel Independen: SBIS, <i>Non Performing</i>	Ordinary Least Square (OLS)	SBIS berpengaruh negatif tidak signifikan. NPF berpengaruh positif tidak signifikan dan DPK berpengaruh positif signifikan.

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
	Syariah	<i>Financing</i> (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK)		
4	Eni Indrawati. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja UMKM Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Juni 2014-November 2016)	Variabel Dependen: Pembiayaan Modal Kerja terhadap UMKM Variabel Independen: <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, dan Margin.	Vector Error Correction Model (VECM)	Dalam jangka pendek variabel Margin berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Modal Kerja UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel NPF, DPK, dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PMK. Dalam jangka panjang, hasil estimasi menunjukkan bahwa semua variabel yaitu NPF, DPK, Inflasi dan Margin berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan modal kerja.
5	Tita Nursyamsiah. (2017). <i>Macroeconomic Determinants of Islamic Banking Financing.</i>	Variabel Dependen: Pembiayaan Bank Syariah Variabel Independen: <i>Industrial production index</i> (IPI), <i>customer price index</i> (CPI), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) rate and perdagangan internasional	Vector Error Correction Model (VECM)	Hubungan satu arah terjadi antara pembiayaan perbankan Islam dan output riil serta pembiayaan perbankan Islam dan perdagangan perbankan syariah. Dalam hal ini, pembiayaan perbankan Islam dipengaruhi oleh (IPI). Pembiayaan perbankan syariah tidak terpengaruh oleh perdagangan tetapi perdagangan secara signifikan dipengaruhi oleh pembiayaan

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
				perbankan Islam. Selain itu, pembiayaan perbankan Islam relatif sensitif terhadap guncangan tingkat harga, output riil, dan suku bunga.
6	Fadla Nurmanilla. (2016). Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.	Variabel Dependen: Pembiayaan BPRS Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Biaya Promosi, Inflasi, Suku Bunga.	Ordinary Least Square (OLS)	(DPK), (NPF), dan <i>Equivalent Rate</i> berpengaruh positif signifikan. (CAR) mempunyai pengaruh negatif signifikan. Biaya Promosi dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan.
7	Raras Palupi Astarini. (2016). <i>The Impact of Internal and External Factors on Financing of Sharia Banks in Indonesia</i>	Variabel Dependen: Pembiayaan SME dan Pembiayaan non-SME Variabel Independen: SBIS bonus rate, inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Return on Asset</i> (ROA)	Ordinary Least Square (OLS)	SBIS bonus rate tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bank syariah. Inflasi berpengaruh negatif terhadap kedua pembiayaan; (DPK) and (FDR) berpengaruh positif terhadap kedua pembiayaan; (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan SME tetapi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan non-SME; dan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bank syariah.
8	Shamsun Nahar.	Variabel	<i>The</i>	GDP dan Inflasi

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
	(2016). <i>Are Macroeconomic Factors Substantially Influential for Islamic Bank Financing? Cross-Country Evidence</i>	Dependen: Pembiayaan Bank Syariah dari beberapa negara Variabel Independen: Suku bunga, GDP, inflasi, dan nilai tukar	<i>feasible generalize d least squares</i> (FGLS)	berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Nilai tukar dan suku bunga berpengaruh negative terhadap pembiayaan bank syariah.
9	Ayank Narita Dyatama. (2015). <i>Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.</i>	Variabel Dependen: Pembiayaan pada Bank Syariah Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), ROA, FDR dan penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	Ordinary Least Square (OLS)	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan. NPF dan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan perbankan syariah.
10	Rahmat Dahlan. (2014). <i>Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia dan Tingkat Inflasi terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.</i>	Variabel Dependen: pembiayaan Bank Syariah Variabel Independen: Bonus Sertifikat Bank Indonesia, tingkat inflasi	Ordinary Least Square (OLS)	Bonus Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bank syariah dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah.

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta - fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

2.8.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber dana yang dapat diandalkan oleh bank. Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank atau dana yang bersumber dari pihak ketiga dihimpun oleh sektor perbankan dalam bentuk tabungan (*saving deposit*), deposito berjangka, giro dan sertifikat deposito. Secara teknis, DPK pada bank syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah dan deposito *mudharabah*. Bank dapat memanfaatkan DPK ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Volume Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bank akan sangat menentukan volume dana yang dapat dikembangkan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan. Semakin besar volume DPK yang ada, maka semakin besar pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan. Hal ini juga

didukung oleh Penelitian Prayuningrum dan Hasib (2017), Astarini et al. (2016), Indrawati (2017), dan Utami (2018) yang menunjukkan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap
Pembiayaan

2.8.2 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)

Modal bank adalah aspek penting bagi bank dalam melakukan penyaluran dana. Tingkat kecukupan modal menjadi salah satu tolak ukur bagi kepercayaan dari nasabah. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menjadi salah satu rasio yang menggambarkan tingkat permodalan bank. CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (pembiayaan, surat berharga, tagihan pada bank lain).

Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin besar sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Semakin tinggi CAR menunjukkan bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak kepada pelaku usaha. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Afsari (2018) dan Kusnianingrum (2016)

dengan hasil penelitian bahwa CAR berpengaruh positif signifikan pada pembiayaan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: CAR (*Capital Adequacy Ratio*) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan.

2.8.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)

Rasio likuiditas merupakan kemampuan suatu bank untuk membayar kewajibannya pada jangka pendek dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap hutang lancarnya atau kewajiban jangka pendek. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, memenuhi permintaan kredit tanpa adanya tanggungan, dan dapat membayar kembali semua deposit. Semakin baik tingkat likuiditas maka kinerja keuangan dari bank tersebut juga semakin baik.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu rasio yang menggambarkan tingkat likuiditas dari suatu bank syariah. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap DPK.

Persentase FDR yang tinggi menunjukkan bahwa Bank Syariah memiliki tingkat likuiditas semakin rendah dikarenakan pembiayaan yang disalurkan lebih tinggi daripada dana yang diterima. Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan kemampuan bank dalam membayar kewajibannya yang semakin rendah atau dapat dikatakan bahwa likuiditasnya rendah. Namun nilai FDR yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang semakin meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian dari Nurrochman (2016), Adzimatunur et al (2015), Kusnianingrum (2016), dan Astarini et al. (2016).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan.

2.8.4 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)

Pembiayaan bermasalah merupakan hal yang tidak menggembirakan bagi pihak bank. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kegagalan pihak peminjam dana tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan yang telah disepakati kedua belah pihak dalam akad. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan. Besarnya NPF

mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang terkait dengan penyaluran pembiayaan. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan dana yang besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Astarini et al (2016) dan Adzimatunur et al (2015), di mana *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan

2.8.5 Pengaruh SBIS terhadap terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah salah satu instrumen dalam kebijakan moneter yang diatur oleh Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui mekanisme lelang dengan perbankan syariah diperbolehkan untuk membeli SBIS tersebut. Bank Indonesia menerbitkan SBIS dengan kuantitas banyak menunjukkan Bank Indonesia perlu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini pun berdampak pada bank syariah yang cenderung untuk menginfestasikan dana

mereka pada SBIS dan akan mengurangi pembiayaan yang akan disalurkan. Keadaan tersebut akan sejalan dengan tujuan BI untuk menerbitkan SBIS. Maka dari itu dapat disimpulkan, semakin tinggi SBIS akan berdampak semakin rendahnya BUS menyalurkan pembiayaan.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Muhammad (2018) dengan hasil SBIS berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan modal kerja Bank Syariah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan

2.8.6 Pengaruh Inflasi terhadap terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)

Inflasi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian dari suatu negara. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi sangat berhubungan dengan tingkat harga di pasar yang secara dapat mempengaruhi kegiatan usaha produktif.

Inflasi yang tinggi dapat berdampak pada lesunya kegiatan usaha. Pelaku usaha pun cenderung untuk tidak mengambil pembiayaan karena saat inflasi tinggi, daya beli dari masyarakat pun akan turun. Lesunya perekonomian membuat menurunnya permintaan pembiayaan dari usaha sektor riil. Hal itu menunjukkan, semakin tinggi inflasi maka Bank Syariah akan

mengurangi pembiayaan hingga kondisi ekonomi kembali stabil. Penelitian yang dilakukan oleh Astarini et al (2016) dan Muhammad (2018) menunjukkan inflasi memiliki pengaruh negatif.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut Uma Sekaran (2006), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.

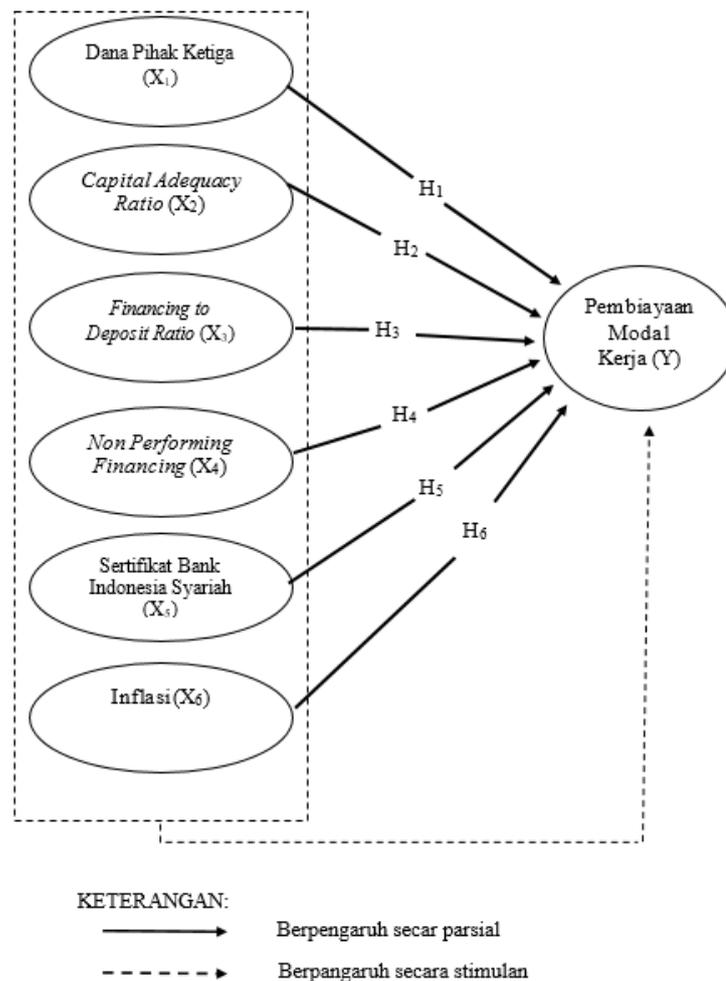
Pemerataan ekonomi menjadi salah satu fokus dalam Ekonomi Islam. Sejalan dengan surah Al-Hasr ayat 7 dalam Al-Quran, agar harta tidak beredar di orang kaya saja. Bank Umum Syariah melalui pembiayaan modal kerja dapat menjalankan hal tersebut karena pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan produktif yang nantinya akan berdampak pada perekonomian sektor riil dan berdampak pada masyarakat luas juga. Namun, pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh bank umum syariah ternyata masih kalah jauh jika dibandingkan dengan kredit modal kerja yang disalurkan oleh bank konvensional.

Perkembangan pembiayaan modal kerja perlu ditingkatkan dan terus dikaji kembali faktor apa saja yang mempengaruhinya, baik dari faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor dari internal bank tentu sangat mempengaruhi

berapa banyak dana yang bisa disalurkan oleh BUS. Begitu juga dengan faktor eksternal yaitu dari kondisi perekonomian. Faktor internal yang diambil adalah DPK, CAR, NPF, dan FDR. Sedangkan inflasi dan SBIS sebagai faktor eksternal.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu dan hipotesis yang telah dikemukakan, dapatlah dibuat kerangka pemikiran antar variabel. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2006). Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai varian tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1999). Variabel dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (Dependen). Berdasarkan pendahuluan dan landasan teori yang telah dipaparkan, variabel dependen dan independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 1999):

1. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel Terikat (Dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen) (Sujarweni, 2018). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat (dependen) adalah penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah pada sektor modal kerja pada periode tahun 2015 - 2019.

2. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari variabel terikat (Sujarweni, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independen) adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), inflasi, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah sebuah definisi yang menggambarkan variabel-variabel penelitian dengan menjelaskan ciri-ciri spesifiknya untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang dilakukan BUS kepada pelaku usaha. Pembiayaan tersebut berupa modal kerja supaya para pelaku usaha dapat melangsungkan operasionalnya. Data pembiayaan modal kerja yang diambil adalah data per bulan dengan satuan Miliar Rupiah.

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dikumpulkan oleh bank dari masyarakat. Dana dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Data ini diambil tiap bulan dengan satuan Miliar Rupiah.

c. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan kecukupan modal dari bank. Rasio ini menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Data *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang diambil adalah data per bulan dengan satuan persen (%).

d. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). *Financing to Deposit Ratio (FDR)* biasanya memiliki satuan persentase (%). Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data per bulan.

e. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi dan dapat mengukur risiko kegagalan pembiayaan yang dihadapi oleh Bank Syariah. Data *Non Performing Financing (NPF)* yang diambil adalah data Per bulan dengan satuan persen (%).

f. Inflasi

Inflasi adalah peristiwa naiknya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Harga yang terus menerus meningkat akan berdampak pada sektor ekonomi makro dan ekonomi mikro. Satuan dari data Inflasi yang diambil adalah persentase (%) dan data yang diambil adalah data per bulan.

g. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Data SBIS yang diambil adalah data per bulan dengan satuan Miliar Rupiah.

Tabel 3. 1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran	Satuan
Pembiayaan Modal Kerja	Pembiayaan berupa modal yang diberikan bank untuk pelaku usaha	Total pembiayaan modal kerja yang dikeluarkan oleh BUS	Miliar Rupiah
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang dikumpulkan oleh bank dari masyarakat	Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh BUS	Miliar Rupiah
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Rasio yang menunjukkan kecukupan modal dari bank	$\frac{\text{Total Modal}}{\text{Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$	Persentase (%)
<i>Financing to Deposit Ratio</i>	Rasio yang digunakan	$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana yang Diterima Bank}} \times 100\%$	Persentase (%)

(FDR)	untuk mengukur likuiditas suatu bank		
<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan	$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$	Persentase (%)
Inflasi	Peristiwa naiknya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus	$\frac{\text{IHK}(t) - \text{IHK}(t - 1)}{\text{IHK}(t - 1)}$	Persentase (%)
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.	Total SBIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia	Miliar Rupiah

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti lalu ditarik kesimpulannya (Sujarweni, 2018). Populasi dapat merujuk pada semua kasus kelompok manusia atau non-manusia seperti objek, wilayah geografis, metode, dan lain-lain. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri Perbankan Syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum

Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sampel adalah bagian atau sebagian kecil dari populasi atau sebuah fragmen dari seluruh objek yang telah diambil dalam penelitian atau bagian yang mewakili keseluruhan. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Tujuan menggunakan *purposive sampling* adalah untuk memperoleh individu sampel yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Berdasarkan alasan tersebut maka karakteristik sampel yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah:

1. Perbankan Syariah yang beroperasi di Indonesia dengan periode 2015-2019
2. Perbankan Syariah memiliki laporan yang dipublikasikan oleh OJK dalam Statistik Perbankan Syariah
3. Perbankan Syariah yang melakukan jasa lalu lintas pembayaran
4. Perbankan Syariah yang secara organisasi sudah terpisah dari bank konvensional

Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama periode tahun 2015 - 2019. BUS merupakan perbankan yang beroperasi di Indonesia dan memiliki laporan yang dipublikasikan oleh OJK selama periode 2015 – 2019. BUS juga melakukan jasa lalu lintas pembayaran sehingga memiliki usaha yang lebih luas dan secara sumber keuangan serta hal lainnya sudah terpisah dari bank konvensional.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Studi ini menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan BUS sektor modal kerja selama 5 tahun pada tahun 2015-2019 yang akan diolah menjadi data per bulan, sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif di mana data tidak disajikan secara verbal, namun data disajikan dalam bentuk angka. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 1999). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data *time series*.

Sumber data dalam penelitian adalah sumber atau asal peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam mendapatkan sumber data. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku, dan lain sebagainya (Hasan, 2002). Variabel dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan yang resmi diunggah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Hal ini dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur dan data yang diunggah oleh lembaga resmi dan berkaitan untuk menunjang penelitian ini, baik berupa pustaka cetak maupun

melalui media elektronik. Dalam studi dokumen, pengumpulan dilakukan dengan cara melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang mempunyai korelasi dengan objek penelitian.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang diunggah oleh lembaga resmi berupa dokumen, peraturan-peraturan pemerintah atau data dari lembaga tersebut. Data di penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Selain itu, penelitian ini juga mengambil data dari laporan yang dirilis oleh Bank Indonesia.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam metode ini, analisis digunakan dengan cara regresi linear berganda atau sering juga dikenal dengan *Ordinary Least Square (OLS)*. Persamaan regresi linier berganda merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel bebas/ dependen (X) dengan satu variabel terikat/ independen (Y). Dalam penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Analisis dilakukan menggunakan aplikasi *E-Views 9*.

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan regresi linear berganda, diperlukan adanya uji asumsi klasik. Uji Asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah data yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik. Asumsi klasik merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Asumsi klasik pada regresi linear sederhana yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2005). Model dikatakan baik apabila memiliki data yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara Uji *Jarque-Bera*. Pengambilan keputusan dalam pengujian dilakukan dengan melihat nilai Sig. pada uji *Jarque-Bera*. Jika nilai Sig. $< 0,05$ pada uji tersebut maka data terindikasi tidak normal. Sebaliknya, apabila nilai Sig. $> 0,05$ maka data terindikasi normal.

3.5.1.2 Uji Autokorelasi

Uji asumsi autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (Ghozali, 2005). Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Analisis ini dilihat dengan cara membandingkan DW hitung dengan d_U dan d_L yang terdapat di tabel.

3.5.1.3 Heteroskedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan

jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Umar, 2011). Data yang baik adalah data yang homoskedastisitas.

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah uji glejser yang bisa didapatkan dari penggunaan aplikasi *E-Views*. Penarikan kesimpulan dari penggunaan uji glejser adalah apabila nilai Chi-Square $< 0,05$, maka data teridentifikasi memiliki heteroskedastisitas dan begitupun sebaliknya.

3.5.1.4 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi masing-masing variabel bebas (independen) saling berhubungan secara linier. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi linier/hubungan yang kuat antara variabel bebasnya. Jika dalam model regresi terdapat gejala multikolinieritas, maka model regresi tersebut tidak dapat menaksir secara tepat sehingga diperoleh kesimpulan yang salah tentang variabel yang diteliti.

Mengukur multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari masing-masing variabel. Jika nilai $VIF > 10$ maka terdapat multikolinieritas, atau sebaliknya jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terdapat multikolinieritas dan tidak diperlukan penyembuhan data.

3.5.2 Uji Regresi Linear Berganda

Setelah data memenuhi asumsi klasik, barulah bisa dilakukan uji Regresi Linear Sederhana dan menguji apakah hipotesis dapat diterima atau tidak. Uji hipotesis terdiri dari, yaitu:

1. Analisis Regresi Berganda

Data yang telah dikumpulkan sebelumnya lalu akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda atau *Ordinary Least Square* (OLS). Persamaan regresi yang dibentuk dari hasil uji regresi adalah sebagai berikut:

$$\ln Y = a + b_1 \ln X_1 + b_2 \ln X_2 + b_3 \ln X_3 + b_4 \ln X_4 + b_5 \ln X_5 + b_6 \ln X_6$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah

a = konstanta

b = *slope*

X₁ = Dana Pihak Ketiga (DPK)

X₂ = *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

X₃ = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

X₄ = *Non Performing Financing* (NPF)

X₅ = Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

X₆ = Inflasi

e = residual

2. Nilai Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*Goodness of Fit*), yang dinotasikan dengan R² ataupun *adjusted R²* merupakan besaran yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi biasanya antara nol dan satu atau dinyatakan dalam persen.

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi - variabel dependen (Ghozali, 2005). Semakin besar nilai R^2 , maka semakin baik pula variasi variabel yang digunakan dalam model regresi.

3. Uji Statistik t Parsial

Uji t dilakukan supaya mengetahui hubungan antara masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel bebas terikat. Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung yang didapatkan terhadap t tabel serta membandingkan nilai signifikansi. Uji ini dapat dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05 atau tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hipotesis yang ada diterima apabila $t_{Hitung} > t_{Tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$.

4. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Pengujian pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap

besarnya nilai *probability* (*F-Statistic*). Variabel bebas secara simultan akan berpengaruh terhadap variabel terikat apabila nilai *probability* (*F-Statistic*) < 0.05 .

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Pembiayaan pada Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Fungsi tersebut yang mendasari kegiatan BUS dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan kepada nasabah yang memerlukannya dan layak untuk memperolehnya (Arifin, 2006).

Jenis pembiayaan pada bank syariah terbagi juga atas akad yang mendasari pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan pada bank syariah terdiri dari pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) berbentuk pembiayaan investasi dan modal kerja, jual beli (*murabahah*, *salam*, *isthisna*) berbentuk dalam pembiayaan properti, sewa (*ijarah*) berbentuk sewa beli dan akuisisi aset serta pinjaman (*qardh*) berbentuk pembiayaan surat berharga. Perkembangan pembiayaan apabila dibagi atas akad yang digunakan dapat dilihat di Tabel 4.1.

Tabel 4. 1

**Perkembangan Pembiayaan menurut Akad pada Bank Umum Syariah
Tahun 2015-2019 (dalam Miliar Rupiah)**

Pembiayaan	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Mudharabah</i>	7979	7577	6584	5477	5413
<i>Musyarakah</i>	44419	50546	57315	68644	84582
<i>Murabahah</i>	87789	105112	110115	118134	122725
<i>Qardh</i>	3306	3883	5474	6848	9276
<i>Isthisna</i>	120	25	18	15	27
<i>Ijarah</i>	1368	1714	2622	3180	3210

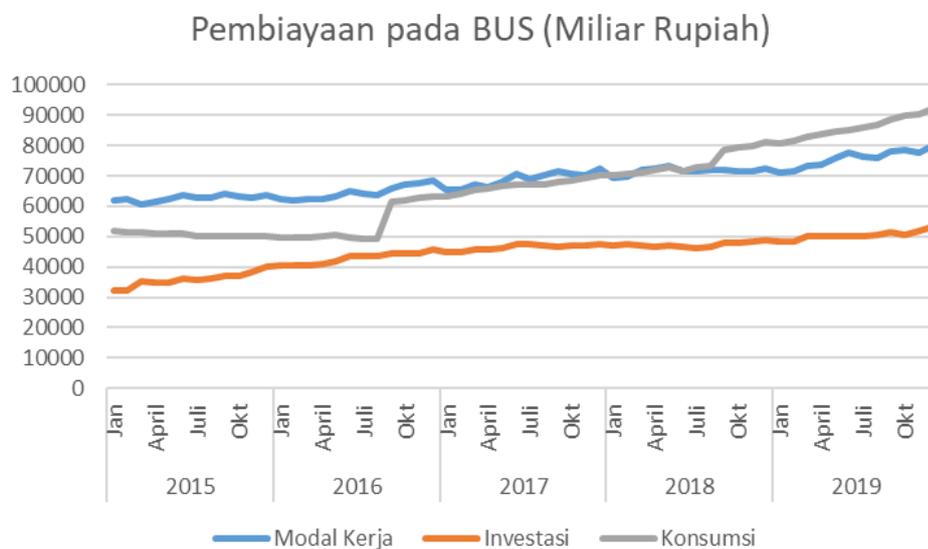
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan

Pembiayaan yang paling mendominasi pada BUS adalah pembiayaan *murabahah* dibanding pembiayaan dengan akad lainnya. Mekanisme akad *murabahah* dilakukan dengan cara bank syariah terlebih dahulu membeli barang-barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah sebesar harga pokok lalu dijual kepada nasabah dengan keuntungan margin yang sudah disepakati sebelumnya. Konsep pembiayaan *murabahah* ini berangkat dari surah al-Baqarah: 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan adanya riba dalam berbagai bentuk transaksi

Akad *murabahah* memiliki angka yang paling tinggi karena dapat memberikan pendapatan yang lebih pasti atau lebih mudah untuk dikontrol karena keuntungan margin ditentukan di awal dari pembelian suatu barang (Sjahdenini, 2014). Pembiayaan modal kerja sendiri menurut Sjahdenini (2014) paling banyak menggunakan akad *murabahah* dibanding pembiayaan dengan akad lainnya.

Pembiayaan juga dibagi menurut jenisnya, yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif terdiri dari pembiayaan modal kerja dan investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif terdiri dari pembiayaan konsumsi. Perkembangan pembiayaan pada BUS dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4. 1
Perkembangan Pembiayaan pada Bank Umum Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Perkembangan pembiayaan modal kerja selama 2015 hingga 2019 tidak begitu banyak peningkatannya jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumsi. Pada tahun 2019, volume pembiayaan konsumsi mencapai 90.000 Miliar Rupiah sedangkan pembiayaan modal kerja hanya mencapai sekitar 79.000 Miliar Rupiah. Namun, pembiayaan modal kerja masih lebih stabil jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumsi yang beberapa kali mengalami fluktuasi cukup tajam selama lima tahun tersebut. Sedangkan, penyaluran pembiayaan investasi masih di bawah pembiayaan konsumsi dan modal kerja.

Pembiayaan investasi hanya berkisar 30.000 Miliar Rupiah – 50.000 Miliar Rupiah.

4.1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

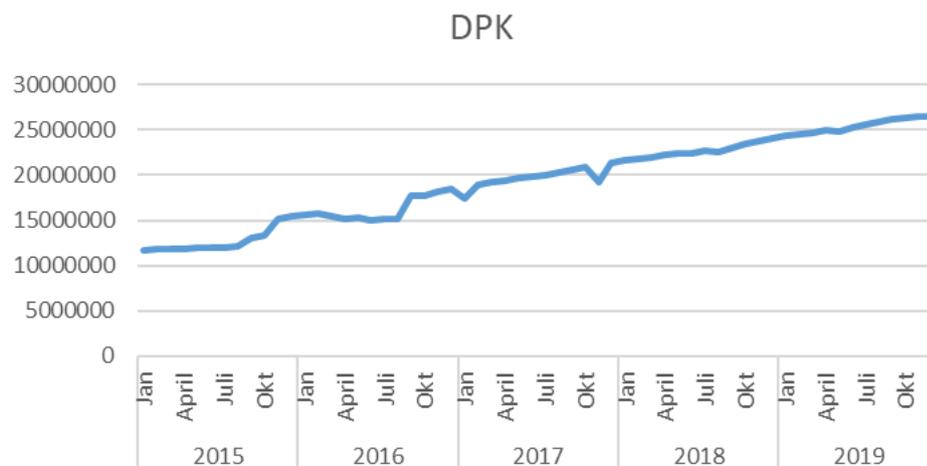
Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana dari masyarakat yang dihimpun oleh sektor perbankan dalam bentuk tabungan (*saving deposit*), deposito berjangka, giro dan sertifikat deposito. Secara teknis, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah dan deposito *mudharabah*.

Lima tahun terakhir tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK) pada BUS terbilang cukup berfluktuasi walaupun dua tahun terakhir sudah cenderung meningkat. Secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat walaupun beberapa kali mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 4.2. Bulan Januari tahun 2015 nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) masih sebesar 11,730,009 Miliar Rupiah dan pada Desember 2019 nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 26,553,798 Miliar Rupiah.

Fluktuasi yang dihadapi dari pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) tentunya akan berdampak pada penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah karena Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang paling besar dari bank syariah. Bank Syariah dapat menyalurkan banyak pembiayaan apabila dana yang dikumpulkan oleh bank syariah juga banyak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa apabila volume Dana Pihak Ketiga (DPK) semakin tinggi

maka akan berdampak pada penyaluran pembiayaan yang akan semakin meningkat pula.

Gambar 4. 2
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah



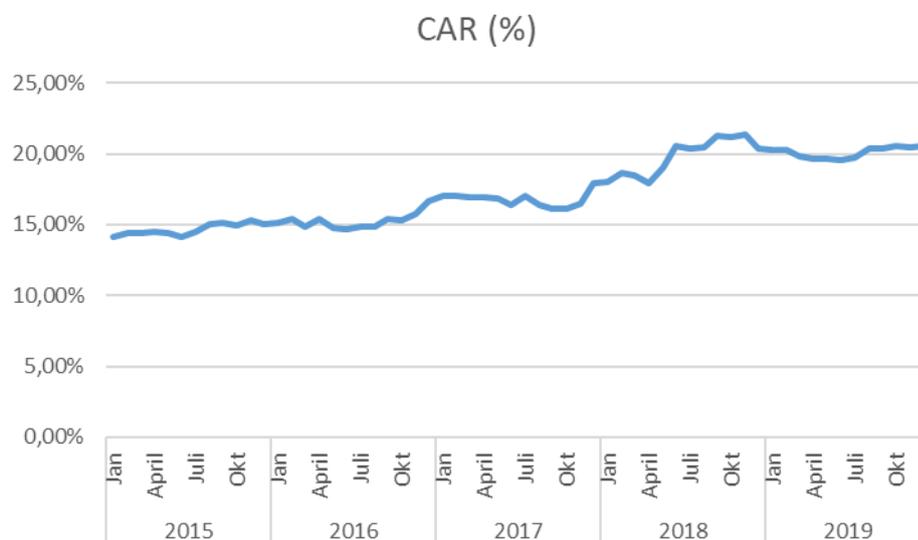
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

4.1.3 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank, semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi modal. Permodalan sangat penting untuk kelangsungan BUS untuk mengembangkan usaha dan menopang risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif. Bank tidak hanya harus mempunyai Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tinggi, namun juga modal yang tinggi karena jika tidak diimbangi dengan tambahan modal maka bank tetap akan terbatas dalam menyalurkan kreditnya.

Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada BUS selama lima tahun terakhir cukup berfluktuasi walaupun secara keseluruhan nilai (CAR) meningkat pada akhir 2019. Perkembangan nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) selama lima tahun terakhir, dari tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat di Gambar 4.3.

Gambar 4.3
Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Umum Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

4.1.4 Financing to Deposit Ratio (FDR)

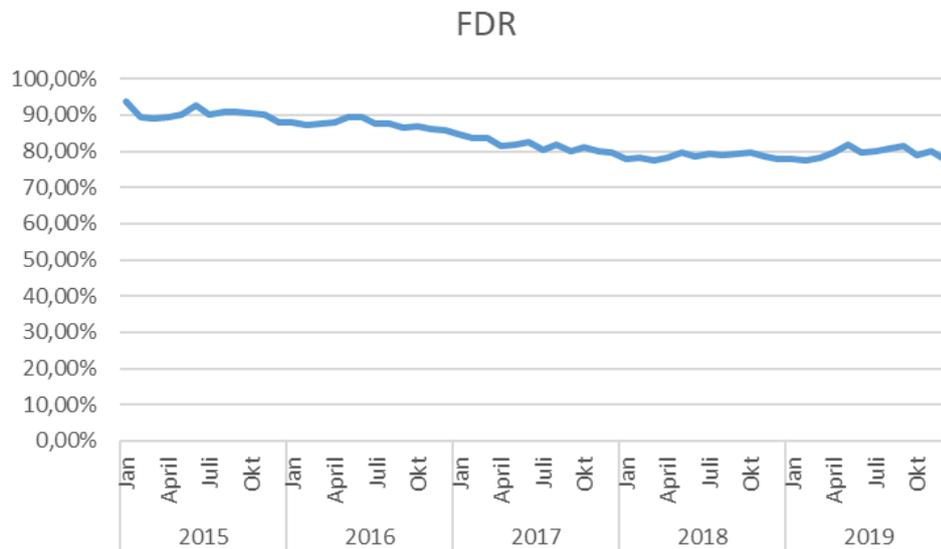
Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu rasio pada perbankan syariah yang menunjukkan tingkat likuiditas dari suatu bank syariah. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah yang menaruh uangnya di bank dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Perhitungan dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dilakukan dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap DPK. Semakin besar nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan tingkat likuiditas yang rendah dari suatu bank, namun nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi juga menunjukkan pembiayaan yang dikeluarkan juga besar.

Rasio *Financing to deposit ratio* (FDR) perbankan syariah dinilai akan efektif untuk bank syariah mendapatkan perolehan imbal hasil tinggi jika rasio berada pada kisaran 95%-98%. Hal tersebut menunjukkan dari 100% dana yang terkumpul dari masyarakat, sebanyak 95%-98% di antaranya disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah.

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) selama tahun 2015 hingga 2019 bergerak cenderung stabil walaupun tetap sering mengalami fluktuasi. Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tercatat tidak mengalami kenaikan yang tajam pada tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015 hingga 2019, rasio FDR cenderung menurun. Nilai rasio FDR yang paling tinggi terjadi pada bulan Januari 2015 sebesar 93,60%. Selama tahun 2015 rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) masih sering mencapai angka persentase sekitar 90%, sedangkan pada tahun 2018 sampai 2019 Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki nilai yang cukup rendah dengan mencapai angka sekitar 70% saja. Nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang paling rendah terjadi pada bulan Februari 2019 dengan angka sebesar 77,52% saja. Perkembangan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4. 4

Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

4.1.5 Non Performing Financing (NPF)

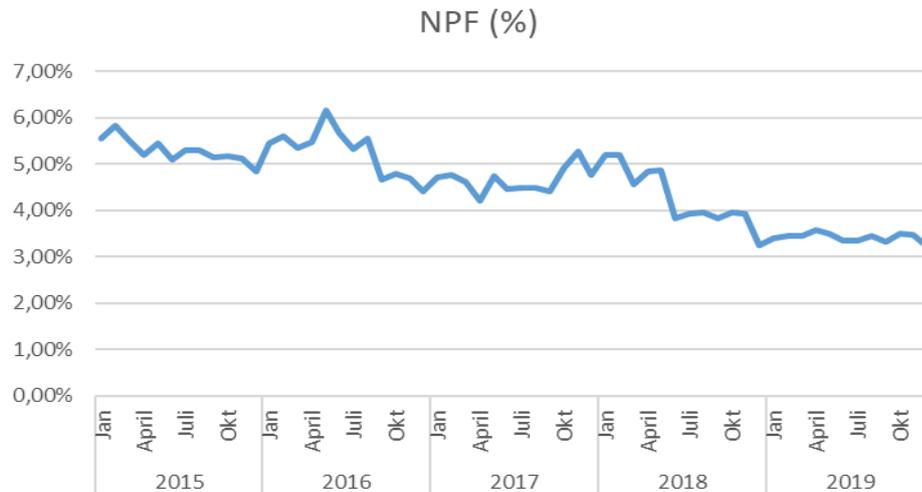
Non Performing Financing (NPF) merefleksikan besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah (Pratami, 2011). Suatu bank dikatakan baik apabila memiliki nilai NPF yang rendah. Nilai NPF yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap operasional bank, sehingga tingkat NPF harus selalu dijaga.

Berdasarkan Gambar 4.5, selama tahun 2015 hingga 2019, nilai *Non Performing Financing* (NPF) secara keseluruhan mengalami penurunan walaupun tidak lepas dari kenaikan beberapa kali. Awal tahun 2015 nilai *Non*

Performing Financing (NPF) berada sebesar 5,56% dan mengalami penurunan cukup banyak pada akhir tahun 2015 menjadi 4,84%. Rasio tersebut menjadi rasio yang paling rendah sepanjang tahun 2015, namun rasio *Non Performing Financing* (NPF) kembali mengalami kenaikan tinggi pada Januari 2016 sebesar 5,46% dan terus mengalami kenaikan beberapa pada tahun 2016. Setelahnya nilai NPF terus berfluktuasi hingga dua tahun belakangan ini, tahun 2018 dan 2019, nilai *Non Performing Financing* (NPF) terus memiliki nilai yang rendah disbanding tahun-tahun sebelumnya, bahkan pada Desember 2019 nilai *Non Performing Financing* (NPF) hanya sebesar 3,23%.

Gambar 4. 1

Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah



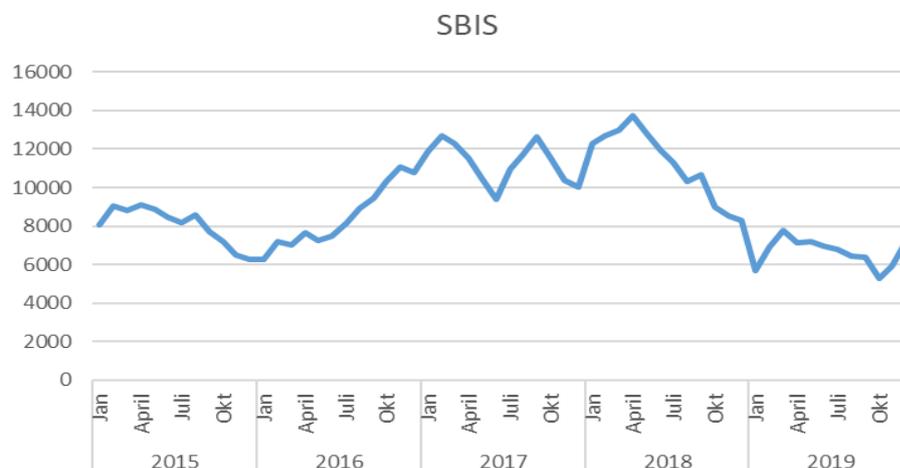
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

4.1.6 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan salah satu bentuk kebijakan moneter untuk mengendalikan perekonomian Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menerbitkan SBIS untuk dibeli oleh BUS dan UUS. BUS menempatkan dananya pada SBIS yang diterbitkan oleh BI, sehingga penempatan dana yang dilakukan BUS ke sektor lainnya pun berpengaruh termasuk pada sektor pembayaran. Nilai SBIS selama 2015 hingga 2019 dapat dilihat dalam Gambar 4.6.

Gambar 4.2

Perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah



Sumber: Bank Indonesia

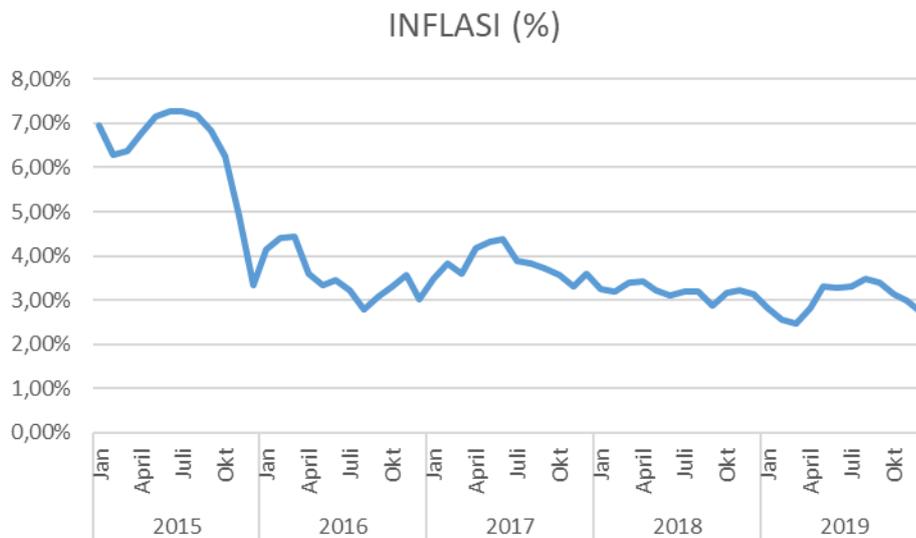
Selama 2015 hingga 2019 pergerakan nilai SBIS sangat berfluktuatif. Nilai SBIS beberapa kali mengalami kenaikan atau penurunan yang cukup tajam. Nilai tertinggi SBIS berada pada April 2018 sebesar 13,737 Miliar

Rupiah, sedangkan pada bulan Oktober 2019 mengalami nilai paling rendah sebesar 5,290 Miliar Rupiah.

4.1.7 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan BUS. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana nilai suatu harga barang terus mengalami kenaikan dalam periode tertentu. Tingkat inflasi sangat mempengaruhi perekonomian negara, sehingga perlu dikendalikan agar nilainya tetap stabil.

Gambar 4. 3
Perkembangan Inflasi di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan Gambar 4.7, Inflasi pada periode 2015 – 2019 menunjukkan terus mengalami kenaikan serta penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 nilai Inflasi sempat mencapai angka yang sangat tinggi hingga

mencapai 7,26%, namun setelah itu nilai inflasi cenderung turun dan stabil berkisar 3% - 4% hingga tahun 2019.

4.2 Analisis Data

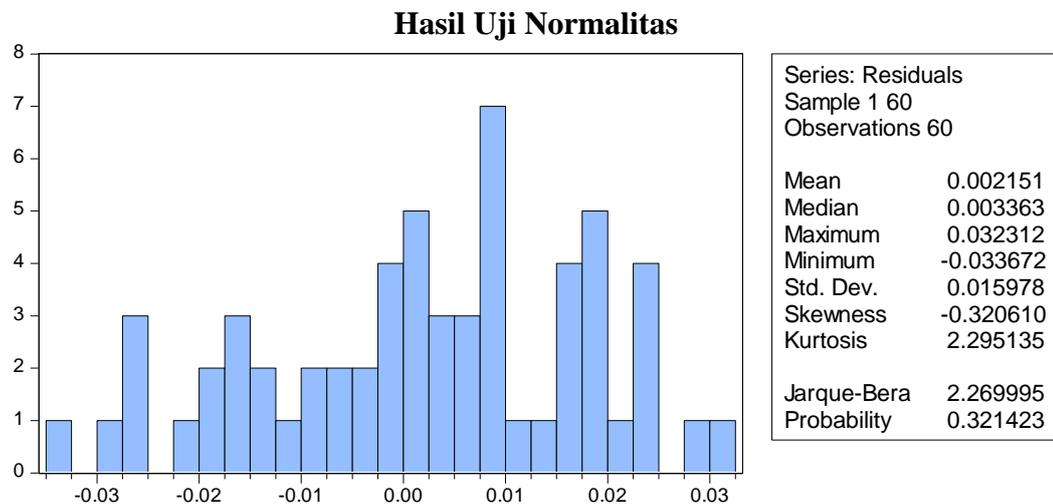
4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah data yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik sehingga valid untuk digunakan sebagai alat penduga. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.2.1.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan dengan metode uji statistik *Jarque-Bera*. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara Uji *Jarque-Bera*. Pengambilan keputusan dalam pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Sig. atau *probability* pada uji *Jarque-Bera* dengan nilai taraf nyata (α) sebesar 0,05. Jika nilai Sig. < 0,05 pada uji tersebut maka data terindikasi tidak normal. Sebaliknya, apabila nilai Sig. > 0,05 maka data terindikasi normal.

Hasil uji normalitas terhadap data penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.8. Nilai Sig. yang didapatkan dari uji normalitas sebesar 0,3216423. Nilai tersebut menunjukkan nilai Sig > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terindikasi normal.

Gambar 4. 4

Sumber: Data diolah

4.2.1.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Analisis uji korelasi dilihat dengan cara membandingkan DW hitung yang didapatkan dari hasil uji dengan d_U dan d_L yang didapatkan dari tabel durbin watson. Uji autokorelasi dibagi menjadi dua yaitu uji autokorelasi negatif dan uji autokorelasi positif. Data tidak mengandung autokorelasi negatif jika nilai $(4 - dW) > d_U$. Hasil uji analisis data durbin watson yang sudah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4. 2

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

Nilai hitung Durbin-Watson	Nilai Tabel d_U	Nilai Tabel d_L
0,740680	1,8505	1,3349

Sumber: Data diolah

Hasil dari uji autokorelasi yang sudah dilakukan, didapatkan ($4-dW$) $>$ dU , sebesar $3,259310 > 1,3349$. Sehingga, dapat di katakan tidak terjadi autokorelasi negatif. Data tidak terkena penyakit autokorelasi positif apabila $dW > dU$, namun dari hasil yang didapatkan justru $dW < dU$ sebesar $0,740680 < 1,8505$. Hal tersebut menunjukkan terdapat autokorelasi positif pada data. Maka dari itu, perlu dilakukan penyembuhan agar tidak mengalami autokorelasi positif.

Penyembuhan data salah satunya dapat dilakukan dengan metode *Cochrane-Orcutt*. Metode dalam *Cochrane-Orcutt* dilakukan dengan dua tahap yaitu menentukan korelasi rho antar beberapa pasang pengamatan dalam model dan kemudian menjalankan regresi dengan *autoregressive orde* 1 atau AR(1) untuk menghilangkan korelasi antar *error*. Apabila autokorelasi masih belum bisa disembuhkan maka akan dilanjutkan dengan proses *autoregressive orde* 1 atau AR(2). Langkah penyembuhan dalam penelitian ini dilakukan hingga langkah AR(1) karena sudah autokorelasi yang terjadi sudah dapat disembuhkan. Hasil dW yang sudah mengalami penyembuhan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson setelah Perbaikan

Nilai hitung Durbin-Watson	Nilai Tabel dU	Nilai Tabel dL
2,078476	1,8505	1,3349

Sumber: Data diolah

Setelah dilakukan penyembuhan autokorelasi menggunakan *Cochrane-Orcutt*, didapatkan $(4-dW) > dU$, $1,921524 > 1,3349$. Sehingga, dapat dikatakan data tidak mengalami autokorelasi negatif. Uji autokorelasi positif didapatkan dari $dW > dU$, $2,078476 > 1,8505$. Hal tersebut menunjukkan data tidak lagi terkena autokorelasi positif. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa data sudah tidak mengandung autokorelasi baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif.

4.2.1.3 Uji Multikolinearitas

Model regresi dikatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila tiap variabel bebas tidak saling berhubungan secara linear saat dilakukannya uji multikolinearitas. Mengukur multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF. Jika nilai $VIF > 10$ maka terdapat multikolinieritas, atau sebaliknya jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terdapat multikolinieritas dan tidak perlu dilakukan penyembuhan data lagi. Hasil dari uji multikolinearitas yang sudah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
ln_DPK	1,553248
ln_CAR	1,422928
ln_FDR	1,456721
ln_NPF	1,324670
ln_SBIS	1,165976
ln_Inflasi	1,659985

Sumber: Data diolah

Berdasarkan nilai dari hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 4.4, maka diperoleh interpretasi sebagai berikut:

- a. DPK tidak mengalami multikolinearitas karena memiliki nilai VIF $(1,553248) < 10$
- b. CAR tidak mengalami multikolinearitas karena memiliki nilai VIF $(1,422928) < 10$
- c. FDR tidak mengalami multikolinearitas karena memiliki nilai VIF $(1,456721) < 10$
- d. NPF tidak mengalami multikolinearitas karena memiliki nilai VIF $(1,324670) < 10$
- e. SBIS lolos uji multikolinearitas karena dari hasil yang didapatkan memiliki nilai VIF $(1,165976) < 10$
- f. Inflasi tidak mengalami multikolinearitas karena memiliki nilai VIF $(1,659985) < 10$

4.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apabila dalam model regresi terjadi kesamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Metode dalam pengujian heteroskedastisitas salah satunya adalah menggunakan uji glejser. Pengambilan keputusan apabila nilai probabilitas *Chi-Square* lebih dari nilai tarif nyata (0.05), maka pada model regresi tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Hasil dari uji glejser yang dilakukan dapat dilihat dari Tabel 4.5.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Persamaan	Nilai
Prob. F (6,53)	0,6494
Prob. Chi-Square (6)	0,6206

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil yang sudah didapatkan dari uji Heteroskedastisitas Glejser, nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,6206. Nilai tersebut lebih besar dari nilai taraf nyata (α) sebesar 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan pada model regresi tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4.2.2 Analisis Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengukur pengaruh dari variabel-variabel bebas atau dependen terhadap variabel terikat atau independen.

4.2.2.1 Hasil Regresi Linear Berganda

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor variabel bebas apa saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan modal kerja pada BUS. Hasil dari uji regresi linear berganda sebelum dilakukan koreksi karena adanya penyakit pada uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	5,656317	0,884180	6,397764	0,0000
ln_DPK	0,323225	0,057123	5,658376	0,0000
ln_CAR	-0,042773	0,082957	-0,515607	0,6083
ln_FDR	0,052647	0,172941	0,304422	0,7620
ln_NPF	-0,070588	0,043462	-1,624111	0,1103
ln_SBIS	0,000472	0,016608	0,028440	0,9774
ln_Inflasi	0,068640	0,020866	3,289599	0,0018

Sumber: Data diolah

Setelah dilakukan perbaikan pada data yang terkena autokorelasi yang disembuhkan dengan metode *Cochrane-Orcut*, hasil yang didapatkan pun berbeda dari hasil sebelumnya. Terdapat perbedaan hasil yang didapatkan setelah mengalami perbaikan.

Hasil pengujian linier setelah dilakukan perbaikan dengan metode *Cochrane-Orcutt* dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4. 7**Hasil Uji Regresi Linear Berganda Setelah Koreksi**

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	7,699571	1,056752	7,286073	0,0000
ln_DPK	0,176550	0,062496	2,824989	0,0067
ln_CAR	-0,187061	0,090878	-2,058383	0,0447
ln_FDR	0,247032	0,144596	1,708434	0,0936
ln_NPF	-0,260261	0,160865	-3,176891	0,0025
ln_SBIS	-0,011577	0,020532	-0,563842	0,5753
ln_Inflasi	-0,008654	0,027693	-0,312496	0,7559

Sumber: Data diolah

Sebuah persamaan variabel dapat dibuat dari hasil uji regresi linear pada Tabel 4.7. Berikut adalah model persamaan variabel yang dapat dibentuk.

$$\ln Y = 7,699571 + 0,176550 \ln X_1 - 0,187061 \ln X_2 + 0,247032 \ln X_3 - 0,260261 \ln X_4 - 0,011577 \ln X_5 - 0,008654 \ln X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah

X₁ = DPK

X₂ = CAR

X₃ = FDR

X₄ = NPF

X₅ = SBIS

X₆ = Inflasi

e = residual

Persamaan yang telah didapatkan di atas berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.5 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga (X₁) sebesar 0,176550 menunjukkan memiliki pengaruh positif yang berarti bahwa setiap peningkatan DPK sebesar 1% maka akan meningkatkan Pembiayaan Modal Kerja sebesar 0,176550% asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tetap.

2. Koefisien regresi variabel *Capital Adequacy Ratio* (X2) sebesar -0,187061 menunjukkan memiliki pengaruh negatif yang berarti bahwa setiap peningkatan CAR sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat Pembiayaan Modal Kerja sebesar 0,187061% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tetap.
3. Koefisien regresi variabel *Financing to Deposit* (X3) sebesar 0,247032 menunjukkan memiliki pengaruh positif yang berarti bahwa setiap peningkatan FDR sebesar 1% maka akan meningkatkan Pembiayaan Modal Kerja sebesar 0,247032% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tetap.
4. Koefisien regresi variabel Rasio *Non Performing Financing* (X4) sebesar -0,260261 menunjukkan memiliki pengaruh negatif yang berarti bahwa setiap peningkatan NPF sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat Pembiayaan Modal Kerja sebesar 0,260261% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tetap.
5. Koefisien regresi variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (X5) sebesar -0,011577 menunjukkan memiliki pengaruh negatif yang berarti bahwa setiap peningkatan SBIS sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat Pembiayaan Modal Kerja sebesar 0,011577% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tetap.
6. Koefisien regresi variabel Inflasi (X6) sebesar -0,008654 menunjukkan memiliki pengaruh negatif yang berarti bahwa setiap peningkatan Inflasi sebesar 1% maka akan menurunkan

tingkat Pembiayaan Modal Kerja sebesar 0,008654% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tetap.

4.2.2.2 Nilai Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien Determinasi (*Goodness of Fit*) merupakan sebuah nilai untuk mengukur seberapa besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R^2 berkisar dari angka nol hingga satu. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin baik pula variasi variabel yang digunakan dalam model regresi. Besar nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4. 8

Nilai Koefisien Determinasi

R Square	Adjusted R Square
0,953613	0,946337

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa nilai R Square sebesar 0,953613 hal ini menunjukkan keseluruhan variabel bebas memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap variabel terikat. Variabel DPK, CAR, FDR, NPF, Inflasi, dan SBIS sebesar 95,3% terhadap pembiayaan modal kerja. Variabel selain variabel diatas yang tidak diteliti berpengaruh sebesar 4,7% terhadap pembiayaan modal kerja.

4.2.2.3 Uji Statistik F

Berbeda dengan Uji Parsial t yang menunjukkan hubungan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, uji F dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen secara sekaligus (DPK, CAR, FDR,

NPF, Inflasi, SBIS) terhadap variabel dependen (Pembiayaan modal kerja pada BUS).

Pengujian pengaruh variabel independen secara bersama- sama (simultan) terhadap perubahan variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji statistic F dilihat dari dua hal yaitu nilai *probability (F-Statistic)* serta membandingkan nilai *F-Statistic* dan F-Tabel. Variabel bebas secara simultan akan berpengaruh terhadap variabel terikat apabila nilai *probability (F-Statistic)* < 0,05 dan apabila nilai *F-Statistic* besar dari F-Tabel. Hasil dari Uji Statistik F dapat dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4. 9

Hasil Uji Statistik F

Prob.(F-Statistic)	F-Statistic	F-Tabel	Hasil
0,000000	131,0570	2,28	Berpengaruh secara signifikan

Sumber: Data diolah

Hasil di atas menunjukkan nilai *prob.(F-Statistic)* lebih kecil dari 0,05 dan nilai *F-Statistic* (131,0570) > F-Tabel (2,28). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa DPK, CAR, FDR, NPF, Inflasi, dan SBIS sebagai variabel bebas secara bersamaan berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan modal kerja pada BUS.

4.2.2.4 Uji Statistik t Parsial

Uji t dilakukan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel bebas terikat. Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung yang didapatkan dari hasil uji terhadap t tabel dengan signifikansi 5%. Apabila nilai t hitung lebih besar daripada t tabel menunjukkan bahwa variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji t juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terika. Hasil dari uji t dapat dilihat dari Tabel 4.10.

Tabel 4. 10

Hasil Uji Statistik t Parsial

Variabel	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Nilai Sig	Hasil Hipotesis
ln_DPK	2,824989	1,67412	0,0067	Berpengaruh positif signifikan
ln_CAR	-2,058383	1,67412	0,0447	Berpengaruh negatif signifikan
ln_FDR	1,708434	1,67412	0,0936	Tidak berpengaruh
ln_NPF	-3,176891	1,67412	0,0025	Berpengaruh negatif signifikan
ln_SBIS	-0,563842	1,67412	0,5753	Tidak berpengaruh
ln_Inflasi	-0,312496	1,67412	0,7559	Tidak berpengaruh

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil Uji Statistik t pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan hasil *t-Statistic* yang

positif yaitu sebesar 2,824989. Sesuai teori, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan t tabel dan *t-Statistic*. Nilai t tabel yang didapatkan sebesar 1,67412 dengan menggunakan uji satu arah, tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan nilai *degree of freedom* atau df sebesar 53. Nilai *t-Statistic* yang didapatkan lebih besar dari pada t tabel ($2,824989 > 1,67412$). Selain itu nilai Sig dari hasil uji lebih kecil dari nilai taraf nyata ($0,0067 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima atau variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan modal kerja BUS.

Variabel *Capital Adequancy Ratio* (CAR) menunjukkan hasil *t-Statistic* yang negatif yaitu sebesar -2,058383. Sesuai teori, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan t tabel dan *t-Statistic*. Nilai t tabel yang didapatkan sebesar 1,67412 dengan menggunakan uji satu arah, tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan nilai *degree of freedom* atau df sebesar 53. Nilai *t-Statistic* yang didapatkan lebih besar dari pada t-Tabel ($2,058383 > 1,67412$). Selain itu nilai Sig dari hasil uji lebih kecil dari nilai taraf nyata ($0,0447 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak karena pada hipotesis tersebut CAR berpengaruh positif, sedangkan dari hasil uji justru CAR berpengaruh negatif signifikan.

Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan hasil *t-Statistic* yang positif yaitu sebesar 1,708434. Sesuai teori, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan t tabel dan *t-Statistic*. Nilai t tabel yang didapatkan sebesar 1,67412 dengan menggunakan uji satu arah, tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan nilai *degree of freedom* atau df sebesar

53. Nilai *t-Statistic* yang didapatkan lebih besar dari pada t-Tabel ($1,708434 < 1,67412$). Namun, nilai Sig dari hasil uji lebih besar dari nilai taraf nyata ($0,0936 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak karena FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja pada BUS.

Variabel *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan hasil *t-Statistic* yang negatif yaitu sebesar $-3,176891$. Sesuai teori, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan t tabel dan *t-Statistic*. Nilai t tabel yang didapatkan sebesar $1,67412$ dengan menggunakan uji satu arah, tingkat signifikansi sebesar $0,05$ dan nilai *degree of freedom* atau df sebesar 53. Nilai *t-Statistic* yang didapatkan lebih besar dari pada t-Tabel ($3,176891 > 1,67412$). Selain itu nilai Sig dari hasil uji lebih kecil dari nilai taraf nyata ($0,0025 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima atau variabel NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan modal kerja BUS.

Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menunjukkan hasil *t-Statistic* yang negatif yaitu sebesar $-0,563842$. Sesuai teori, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan t tabel dan *t-Statistic*. Nilai t tabel yang didapatkan sebesar $1,67412$ dengan menggunakan uji satu arah, tingkat signifikansi sebesar $0,05$ dan nilai *degree of freedom* atau df sebesar 53. Nilai *t-Statistic* yang didapatkan lebih kecil dari pada t tabel ($0,563842 < 1,67412$). Selain itu nilai Sig dari hasil uji lebih besar dari nilai taraf nyata ($0,5753 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak karena SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja pada BUS.

Variabel inflasi menunjukkan hasil *t-Statistic* yang negatif yaitu sebesar -0,312496. Sesuai teori, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan *t* tabel dan *t-Statistic*. Nilai *t* tabel yang didapatkan sebesar 1,67412 dengan menggunakan uji satu arah, tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan nilai *degree of freedom* atau *df* sebesar 53. Nilai *t-Statistic* yang didapatkan lebih kecil dari pada *t* tabel ($0,312496 < 1,67412$). Selain itu nilai Sig dari hasil uji lebih besar dari nilai taraf nyata ($0,7559 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak karena Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan modal kerja pada BUS.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa NPF dan CAR berpengaruh negatif signifikan, sedangkan DPK berpengaruh positif signifikan. Hasil lainnya yang didapatkan adalah FDR, SBIS, dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja pada BUS.

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan lembaga intermediasi dengan fungsi mengumpulkan dana untuk disalurkan kembali dalam berbagai bentuk dan berbagai sektor guna meningkatkan perekonomian negara. Menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari BUS sebagai lembaga intermediasi, terlebih lagi pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan produktif yang dananya tidak berputar di satu sektor saja seperti untuk konsumsi beberapa pihak saja, namun juga terus

berputar di segala sektor. Pembiayaan produktif dapat sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian negara. Maka dari itu, BUS membutuhkan dana untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi baik dalam bentuk pembiayaan maupun untuk kegiatan lainnya.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber dana yang dibutuhkan oleh BUS dalam menjalankan operasionalnya termasuk untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dikumpulkan oleh Bank dari pihak ketiga yaitu masyarakat. Dana yang dikumpulkan dalam bentuk tabungan (*saving deposit*), deposito berjangka, giro dan sertifikat deposito atau dalam bank syariah dalam bentuk giro wadiah, tabungan wadiah dan deposito *mudharabah*.

Berdasarkan hasil Uji Statistik t pada Tabel 4.7, dapat diketahui bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan hasil *t-Statistic* yang positif yaitu sebesar 2,824989 dan nilai sig sebesar 0,0236. Nilai *t-Statistic* yang didapatkan lebih besar dari pada t tabel ($2,824989 > 1,67412$). Selain itu nilai Sig dari hasil uji lebih kecil dari nilai taraf nyata ($0,0067 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPK sebagai variabel bebas berpengaruh positif signifikan terhadap variabel modal kerja Bank Umum Syariah (BUS).

Hasil yang didapatkan sejalan dengan teori yang ada. Volume (DPK) yang berhasil dihimpun bank akan sangat menentukan volume dana yang dapat dikembangkan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan. Semakin besar volume Dana pihak ketiga (DPK) yang ada, maka semakin besar pula dana

yang dapat disalurkan melalui pembiayaan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Prayuningrum dan Hasib (2017), Astarini et al. (2016), Indrawati (2017), dan Utami (2018) yang menunjukkan Dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan.

Dana pihak ketiga (DPK) memiliki dampak positif dan signifikan pada penyaluran pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak dana pihak ketiga yang dapat dikumpulkan, maka semakin banyak pembiayaan yang harus disalurkan. Hal ini berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani pihak yang mempunyai dana dan pihak yang membutuhkan dana. Secara moral bank harus menyalurkan kembali dana yang telah dikumpulkan dan diamanahkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, semakin besar Dana Pihak Ketiga yang diterima, maka semakin meningkat pula peran BUS dalam menyalurkan pembiayaan.

Apabila bank semakin banyak memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa pembiayaan kepada yang membutuhkan, tentunya sesuai dengan syariah Islam pada Surah Al-Baqarah ayat 245. Allah SWT. akan melipatgandakan pembayarannya kepada pihak yang memberi pinjaman, dalam hal ini adalah Bank Umum Syariah yang memberi pinjaman berbentuk pembiayaan pada masyarakat. Surah Al-Baqarah ayat 245 berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له، أَضعافًا
كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرجعون



Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan.

4.3.2 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan

Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)

Modal menjadi salah satu faktor yang harus dimiliki bank untuk mengembangkan usaha dan menopang kemungkinan risiko dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif serta untuk membiayai penanaman dalam aktiva lainnya.

Capital adequacy ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank, semakin besar rasio tersebut maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Bank Indonesia sendiri telah menetapkan kewajiban penyediaan modal perbankan minimum 8% termasuk untuk Bank Syariah. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang sesuai standar menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat.

Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan hasil *t-Statistic* yang negatif yaitu sebesar -2,058383. Sesuai teori, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan t tabel dan *t-Statistic*. Nilai t tabel yang didapatkan sebesar 1,67412 dengan menggunakan uji satu arah, tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan nilai *degree of freedom* atau df sebesar 53. Nilai *t-Statistic* yang didapatkan lebih besar dari pada t tabel ($2,058383 > 1,67412$). Selain itu nilai Sig dari hasil uji lebih kecil dari nilai taraf nyata ($0,0447 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak karena pada hipotesis tersebut CAR berpengaruh positif, sedangkan dari hasil uji justru CAR berpengaruh negatif signifikan.

Capital Adequacy Ratio (CAR) mempengaruhi pembiayaan secara negatif signifikan. Hal ini menunjukkan apabila nilai CAR meningkat, hal tersebut akan menurunkan volume pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh BUS. Hasil dari pengujian yang dilakukan sejalan dengan penelitian dari Asri (2016), Dyatma (2015) dan Nurmanilla (2016).

Hasil studi ini berbeda dari hipotesis yang diajukan. Rata-rata CAR Bank Umum Syariah pada periode 2015-2019 berada pada kisaran yang cukup tinggi yakni 15% - 23%. Angka tersebut jauh di atas ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yakni sebesar 8 persen. Besarnya angka rasio CAR menunjukkan bahwa total modal yang ada di bank lebih besar dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) merupakan total aktiva yang dimiliki oleh bank dan memiliki

risiko yang besar bagi keuangan perbankan. Salah satu aktiva yang mengandung risiko adalah pembiayaan.

Tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber daya finansial (modal) yang *idle* ataupun disalurkan ke sektor lain ataupun investasi lain selain pembiayaan, karena seperti diketahui bahwa pembiayaan merupakan salah satu investasi yang risikonya paling tinggi. Bank sebagai lembaga komersial tentu mempertimbangkan aktivitas yang memiliki risiko terlalu tinggi. Islam pun sudah mengindikasikan bahwa kita harus mengurangi kemudharatan atau dalam konteks ini adalah risiko. Terdapat kaidah fiqih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan (harus) dihilangkan

Sesuai dengan kaidah fiqih yang ada, bank syariah berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi dan menginvestasikan modal yang tersedia ke sektor lain yang memiliki risiko rendah seperti surat berharga. Sehingga, hal ini dapat terjadi bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan modal kerja.

4.3.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu bank untuk membayar kembali hutang atau kewajibannya pada jangka pendek dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap hutang lancarnya

atau kewajiban jangka pendek. Mengelola likuiditas sangat penting dalam Islam karena dalam Islam pun sangat mengutamakan untuk membayar hutang. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan salah satu rasio yang menggambarkan tingkat likuiditas dari suatu bank syariah. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap DPK.

Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan hasil *t-Statistic* yang positif yaitu sebesar 1,708434 dan nilai sig sebesar 0,0936. Nilai *t-Statistic* yang didapatkan lebih kecil dari pada t tabel ($1,708434 > 1,67412$). Selain itu nilai Sig dari hasil uji lebih besar dari nilai taraf nyata ($0,0936 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, FDR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan modal kerja pada BUS.

Perubahan tingkat FDR tidak mempengaruhi pembiayaan modal kerja pada BUS. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahab (2014) dengan hasil FDR tidak mempengaruhi pembiayaan modal kerja.

FDR memiliki dua unsur dalam perhitungan rasio yaitu penyaluran pembiayaan sebagai pembilang dan dana pihak ketiga sebagai penyebut. Berdasarkan gambar 4.4, selama tahun 2015 hingga 2019 walaupun rasio FDR

masih terbilang sehat, namun nilai FDR cenderung menurun. Sedangkan pada gambar 4.2 terlihat bahwa nilai DPK menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Hal ini menggambarkan alasan nilai FDR menurun, karena nilai DPK sebagai pembagi kian meningkat cukup tajam dan tidak diimbangi dengan peningkatan penyaluran pembiayaan yang tajam juga. Maka dari itu, perubahan FDR tidak mempengaruhi tingkat penyaluran pembiayaan.

Keadaan tersebut menggambarkan kecepatan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan lebih rendah dibandingkan dalam penghimpunan dana. Banyak pihak ketiga yang menaruh dananya pada BUS tanpa diimbangi oleh penyaluran pembiayaan. DPK yang banyak terkumpul memang harus dikelola dengan baik untuk kelangsungan BUS kedepannya. DPK tidak hanya fokus disalurkan ke pembiayaan yang memang beresiko saja, namun ke sektor lain juga. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 bahwa aset memang harus dikelola sebaik-baiknya dan jangan sampai harta atau aset tersebut justru menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195, berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat

baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

4.3.4 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)

Pembiayaan bermasalah selalu menjadi ancaman tersendiri bagi jalannya operasional perbankan karena apabila pembiayaan bermasalah semakin tinggi maka bank akan susah untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu rasio yang merefleksikan besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah (Pratami, 2011). Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Mengendalikan rasio *Non Performing Financing* (NPF) agar tetap rendah merupakan salah satu tantangan dari bank syariah. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi akan menyebabkan banyaknya pembiayaan yang macet dan seterusnya akan berakibat bagi bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan termasuk pada sektor pembiayaan modal kerja. Maka dari itu, pihak bank dapat melakukan analisis terhadap calon debitur yang sesuai dengan kriteria yang ada agar pembiayaan yang disalurkan dapat dibayarkan kembali oleh nasabah tersebut. Melakukan penilaian terhadap calon debitur sebelum memberikan pembiayaan juga dilakukan agar pembiayaan

yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberikan keuntungan bagi perbankan.

Berdasarkan hasil pengujian, variabel *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan hasil *t-Statistic* yang negatif yaitu sebesar -3,176891. Sesuai teori, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan *t* tabel dan *t-Statistic*. Nilai *t* tabel yang didapatkan sebesar 1,67412 dengan menggunakan uji satu arah, tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan nilai *degree of freedom* atau *df* sebesar 53. Nilai *t-Statistic* yang didapatkan lebih besar dari pada *t* tabel ($3,176891 > 1,67412$). Selain itu nilai Sig dari hasil uji lebih kecil dari nilai taraf nyata ($0,0025 < 0,05$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima atau variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan modal kerja BUS.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan modal kerja pada BUS. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Astarini et al. (2016), Effendi (2017), Lisa (2016) di mana *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif.

Non Performing Financing (NPF) memiliki efek negatif dan signifikan pada pembiayaan modal kerja, yang berarti bahwa semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin besar jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan. Oleh karena itu, BUS memang perlu menganalisis kemampuan calon debitur untuk membayar kembali pembiayaan sebelum

mendistribusikan dana tersebut kepada debitur. Kelancaran debitur dalam membayar kewajibannya adalah suatu keharusan. Pembayaran pembiayaan adalah suatu keharusan bagi seorang debitur untuk BUS agar dapat beroperasi dengan lancar. Jika BUS memiliki banyak pembayaran macet, BUS tidak dapat menyalurkan pembiayaan lebih luas lagi yang tentunya akan mempengaruhi reputasi dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Tidak hanya menyeleksi calon debitur, setelah distribusi dana diberikan BUS perlu memantau penggunaan pembiayaan tersebut serta kepatuhan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Pemantauan dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan yang mungkin terjadi. Meminimalisir risiko juga sudah sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam salah satu kaidah fiqih yang berarti “kemudharatan (harus) dihilangkan”, mengindikasikan bahwa memang seseorang harus menjauhi kemudharatan atau risiko.

Jumlah *Non Performing Financing* (NPF) yang terlalu tinggi membuat BUS harus menyediakan cadangan dana lebih besar untuk menanggung risiko pembiayaan yang bermasalah. Sehingga dana yang ada bisa terkikis dan penyaluran dana ke sektor lainnya pun terhambat.

BUS harus menyediakan dana untuk menanggung risiko dari adanya pembiayaan macet atau bermasalah. Hal tersebut sangat diperlukan untuk kelangsungan bisnis dari BUS. Tidak hanya penting secara bisnis, ternyata dalam Islam juga memperhatikan hal tersebut. Dalam Islam, seseorang yang dihutangi dianjurkan untuk membantu orang yang berhutang saat tidak mampu

membayar. Hal tersebut terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

4.3.5 Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Umum Syariah (BUS)

Pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal dari bank syariah saja, namun juga terdapat faktor-faktor eksternal dari bank yang dapat mempengaruhi kinerja bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Salah satunya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh BI untuk mengendalikan moneter Indonesia. SBIS menjadi salah satu kegiatan usaha dari Bank Syariah, di mana Bank Syariah dapat berinvestasi pada SBIS tersebut. Bank Syariah akan cenderung menginvestasikan dana pada SBIS. Hal tersebut berdampak pada menurunnya dana yang dialokasikan untuk kegiatan lain, termasuk untuk pembiayaan.

Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menunjukkan hasil *t-Statistic* yang negatif yaitu sebesar -0,563842. Sesuai teori, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan *t* tabel dan *t-Statistic*. Nilai *t*

tabel yang didapatkan sebesar 1,67412 dengan menggunakan uji satu arah, tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan nilai *degree of freedom* atau df sebesar 53. Nilai *t-Statistic* yang didapatkan lebih kecil dari pada t-Tabel ($0,563842 < 1,67412$). Selain itu nilai Sig dari hasil uji lebih besar dari nilai taraf nyata ($0,5753 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_5 ditolak karena SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja pada BUS.

Perubahan dari naik atau turunnya SBIS tidak mempengaruhi volume pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh BUS. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2018) dengan hasil SBIS berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Dyatma (2015) dan Prayuningrum dan Hasib (2017) dengan hasil SBIS mempengaruhi pembiayaan.

Berdasarkan teori, seharusnya semakin tinggi tingkat SBIS, maka bank syariah akan lebih cenderung untuk menaruh dananya di produk tersebut dibandingkan dengan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan, karena SBIS merupakan salah satu instrumen investasi bagi bank yang aman dan memiliki risiko yang rendah. Namun, dalam peraturan Bank Indonesia mengenai SBIS tercantum bahwa dalam melakukan pembelian SBIS, BUS dan UUS wajib memenuhi persyaratan FDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi, meskipun penyaluran dana ke SBIS berubah tetapi selama kondisi FDR masih aman maka penyaluran pembiayaan tidak terpengaruh.

4.3.6 Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Bank

Umum Syariah (BUS)

Inflasi merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan BUS. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana nilai suatu harga barang terus mengalami kenaikan dalam periode tertentu. Tingkat inflasi sangat mempengaruhi perekonomian negara, sehingga perlu dikendalikan agar nilainya tetap stabil. Inflasi menurut derajatnya dapat dibagi menjadi:

1. Inflasi ringan di bawah 10% (*single digit*)
2. Inflasi sedang 10% - 30%
3. Inflasi tinggi 30% - 100%
4. Hyperinflasi di atas 100%

Inflasi yang terus meningkat menyebabkan daya beli masyarakat turun dan uang bernilai lebih rendah. Pemerintah atau Bank Indonesia biasa mengantisipasinya dengan kebijakan fiskal ekspansif atau kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan tersebut dilakukan agar uang yang beredar menurun. Kebijakan moneter sangat berkaitan dengan perbankan. Saat dilakukan kebijakan moneter kontraktif, bank akan mengurangi penyaluran dana yang ada termasuk dalam hal pembiayaan.

Variabel inflasi menunjukkan hasil *t-Statistic* yang negatif yaitu sebesar -0,312496. Sesuai teori, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan *t* tabel dan *t-Statistic*. Nilai *t*-tabel yang didapatkan sebesar 1,67412. Nilai *t-Statistic* yang didapatkan lebih kecil dari pada *t* tabel

(0,312496 < 1,67412). Selain itu nilai Sig dari hasil uji lebih besar dari nilai taraf nyata (0,7559 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₆ ditolak karena Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja pada BUS.

Inflasi tidak mempengaruhi pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah. Meningkat atau menurunnya laju inflasi tidak mengurangi kegiatan BUS dalam menyalurkan dana yang dihimpunnya. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang ada, namun tetap sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurmanilla (2016), Suprihatin (2017), Muklis dan Wahdaniyah (2016) dan Dahlan (2014). Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa inflasi tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan modal kerja.

Hasil penelitian tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi Inflasi pada tahun 2015 – 2019 di mana tingkat inflasi masih tergolong rendah dan stabil sehingga tidak mempengaruhi besarnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh BUS. Tingkat inflasi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2015, dimana nilai Inflasi hingga mencapai 7,26% dan setelah itu tingkat inflasi cenderung stabil dikisaran 3%-4% sehingga kondisi harga dan perekonomian pun cukup stabil. Oleh karena itu, dapat dikatakan pada periode tersebut Inflasi tidak mempengaruhi pembiayaan.

Tingkat inflasi yang stabil menunjukkan pemerintah sangat menjaga pergerakan inflasi agar tidak terlalu tinggi melalui baik kebijakan moneter ataupun fiskal. Sehingga, perekonomian dan pelaku-pelaku usaha pun tidak terlalu terdampak. Pemerintah ataupun BI cepat bertindak dalam menjaga

tingkat inflasi. Kebijakan yang digunakan pun banyak tidak hanya kebijakan moneter saja yang melibatkan dana yang bisa dikelola oleh Bank.

Inflasi dalam Islam juga sudah dikenal sejak zaman dahulu termasuk penanganan-penanganan yang diambil dalam mengatasi Inflasi. Semasa pemerintahan khalifah Umar ibn Khattab r.a, kafilah pedagang yang menjual barangnya di luar negeri membeli dari luar negeri lebih sedikit nilainya dari pada yang mereka jual (*positive net export*). Adanya *positive net export* akan menjadikan keuntungan, keuntungan yang berupa kelebihan uang tersebut akan dibawa masuk ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli. Harga secara keseluruhan pun meningkat. Khalifah Umar ibn Khatab r.a pun melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang komoditi selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya harga kembali normal (Fadilla, 2017).

Penanganan inflasi sudah ada sejak zaman khalifah Umar ibn Khattab r.a karena memang inflasi yang terlalu tinggi akan berdampak pada perekonomian dan dunia usaha pun lesu. Maka dari itu, pemerintah sudah baik dalam menjaga tingkat inflasi tetap stabil sehingga kondisi harga dan perekonomian pun ikut stabil. Inflasi pun tidak mempengaruhi pembiayaan yang diberikan oleh bank.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh faktor internal dan eksternal dari bank terhadap pembiayaan modal kerja pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja pada BUS.
2. Secara parsial, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif pada pembayaran modal kerja di Bank Umum Syariah, sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Hasil lainnya yang didapat adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja BUS.
3. Berdasarkan nilai koefisien determinasi yang didapatkan, Variabel DPK, CAR, FDR, NPF, Inflasi, dan SBIS berpengaruh sebesar 95,3% terhadap

pembiayaan modal kerja. Sedangkan sebesar 4,7% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak diteliti.

4. Variabel yang paling mempengaruhi pembiayaan modal kerja dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF) dikarenakan jika NPF tinggi maka bank harus menyiapkan cadangan dana untuk menanggung risiko pembiayaan yang bermasalah dan laba yang didapatkan pun akan berkurang. Sehingga penyaluran pembiayaan terhambat. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqih yang ada mengenai “kemudharatan (harus) dihilangkan”. Sehingga, BUS harus berhati-hati dalam mengelola NPF agar dapat menimalisir risiko.

5.2. Keterbatasan

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti juga menghadapi kelemahan dan keterbatasan yang dihadapi, antara lain:

1. Objek penelitian ini terbatas dikarenakan hanya menggunakan sampel di Negara Indonesia selama 5 tahun (2015-2019). Sehingga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam periode yang lebih panjang atau bahkan melakukan penelitian pada bank di luar Negara Indonesia supaya dapat menjadi salah satu acuan untuk Bank Syariah di Indonesia.
2. Peneliti hanya menggunakan 1 variabel dependen dan 6 variabel independen saja dalam penelitian ini dan hanya terfokus pada faktor internal yang dinilai dari laporan keuangan bank dan faktor eksternal dari bank yang dinilai dari kondisi perekonomian saja. Peneliti tidak memasukkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

3. Penelitian terdahulu masih tergolong sedikit mengenai pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap pembiayaan modal kerja di bank syariah.

5.3. Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti akan memberikan saran terkait dengan penelitian yang dilakukan sehingga menjadi bahan pertimbangan ataupun masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

1. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Bank Umum Syariah (BUS) dalam melakukan pembiayaan modal kerja kedepannya dikarenakan modal kerja banyak disalurkan ke pihak-pihak UKM yang seperti diketahui UKM berperan besar dalam perekonomian negara. Bank Umum Syariah (BUS) dalam melakukan penyaluran pembiayaan modal kerja perlu memperhatikan tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) karena dalam penelitian ini terbukti variabel tersebut dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan modal kerja.

2. Bagi Pengusaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi para pengusaha apabila ingin mengajukan pembiayaan modal kerja pada BUS. Pengusaha sebelum mengajukan pembiayaan dapat memperhatikan bagaimana perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya sesuai dengan penelitian ini.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi apabila menggunakan alat regresi lain selain *Ordinary Least Square* (OLS) agar hasil yang didapatkan bisa lebih beragam dan valid. Selain itu, peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel pendukung lainnya dan menambahkan periode dari penelitian. Hal ini bertujuan agar penelitian selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh dan dapat lebih mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan modal kerja di bank umum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzimatinur, Fauziyah, Hartoyo, S., & Wiliasih, R. (2015). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 3(2), 106–121.
- Afsari, M. (2018). *Pengaruh CAR, ROA, NPF dan FDR Terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM Pada BPRS Di Indonesia Periode 2012 – 2016*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Algoud, L. M. (2004). *Perbankan Syariah*. Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata. Jakarta: Serambi.
- Almuna, N. (2013). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian pada Bank BPRS di Indonesia*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asri, A. S. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia pada Tahun 2010 - 2014. *Diponegoro Journal of Management*, 5(3), 11–15.
- Astarini, R. P., Hartoyo, S., Nur, T., & Maulana, A. (2016). The Impact of Internal and External Factors on Financing of Sharia Banks in Indonesia. *International Journal of Science and Research*, 5(9), 250–255. <https://doi.org/10.21275/ART20161491>
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut*. Jakarta
- Boediono. (1985). *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi no.2*. Yogyakarta: BPFE.
- Budisantoso, Totok, & Nuritomo. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Burhanuddin. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Dahlan, R. (2014). Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia dan Tingkat Inflasi terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Etikonomi*, 13(2).
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Dyatma, A. N., & Yuliadi, I. (2015). Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 16(1), 73–83.
- Effendi, J. (2017). The Effect of Internal and External Factors of Banking to the SMEs Financing for BPRS in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Institut Pertanian Bogor*, 21(3).
- Fadilla. (2017). Perbandingan Teori Inflasi dalam Perspektif Islam dan Konvensional. *Islamic Banking*, 2(2).
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS* (B. P. UNDIP, Ed.). Semarang.
- Giannini, N. G. (2013). Faktor yang memengaruhi pembiayaan Mudhorobah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawati, E. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja UMKM Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Juni 2014-November 2016)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jaya, Y. P., W, R., & MK, A. (2015). Analisis faktor-faktor penentu pembiayaan perbankan syariah pada sektor pengangkutan dan komunikasi di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 3(1).
- Karim, A. (2010). *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2002). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koch, T. W., & MacDonald, S. S. (2000). *Bank Management*. United State: The Dryden Press.
- Kusnianingrum. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(1).
- Lisa, O. (2016). Determinants Distribution of Financing and the Implications to

Profitability : Empirical Study on Cooperative Sharia Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(2).

- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.
- Muhammad, A. (2018). *Pengaruh Instrumen Kebijakan Fiskal, Moneter Syariah, dan Makroekonomi terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor.
- Muklis, & Wahdaniyah, T. (2016). No Title Pengaruh DPK, Inflasi, dan NPF terhadap Pembiayaan UKM, Studi pada Bank Syariah di Indonesia 2012-2013. *Jurnal ISLAMINOMIC*, 5(2).
- Nugroho, A. (2017). Analisis Pengaruh Kinerja dan Kondisi Makroekonomi terhadap Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi BPRS di Indonesia (Periode: 2011-2015). *Al-Muzara'ah*, 5(2), 148.
- Nurmanilla, F. (2016). *Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurrochman, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Bank Umum Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah). *Diponegoro Journal of Management*, 5(3).
- Otoritas Jasa Keuangan, 2015, Statistik Perbankan Syariah 2015 Desember, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016, Statistik Perbankan Syariah 2015 Desember, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017, Statistik Perbankan Syariah 2015 Desember, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2018, Statistik Perbankan Syariah 2015 Desember, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2019, Statistik Perbankan Syariah 2015 Desember, Jakarta.
- Ovami, D. C. (2018). Pengaruh DPK dan NPF terhadap Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1).
- Parakkasi, I. (2016). Inflasi dalam perspektif Islam. *Laa Maisyir*, 3(1).

- Pratami, W. A. N. (2011). *Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF Dan ROA Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. Universitas Diponegoro.
- Prayuningrum, E. J., & Hasib, F. F. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah. *Jurnal Nisbah*, 3(2).
- Rivai, V. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, B. (2002). *Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan* (4th ed.; BPFE, Ed.). Yogyakarta.
- Rustam, B. R. (2020). Milestone Strategis Perbankan Syariah 2020. *Investor.Id*. Retrieved from <https://investor.id/opinion/milestone-strategis-perbankan-syariah-2020>
- Saunders, A., & Garnet, M. M. (2008). *Financial Institutions Management : A Risk Management Approach*. New York: McGraw-Hill International Edition.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.
- Sjahdenini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Bisnis* (C. A. Beta, Ed.). Bandung.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Suprihatin. (2017). *Pengaruh Kurs, Inflasi, DPK, dan Pendapatan Bank Terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa Periode 2014-2016*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Suryani. (2012). Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Probabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Rasio Keuangan pada BUS dan UUS Periode 2008-2010). *Economica*, 2(2).
- Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Utami, U. R. (2018). The Effect of Bank ' s Internal Factors Towards Micro Financing in Islamic Commercial Bank at Indonesia. *Journal of Islamic*

Economic Laws, 1(1), 78–98.

Wahab. (2014). Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Semarang. *Jurnal Conomica*, 5(2).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

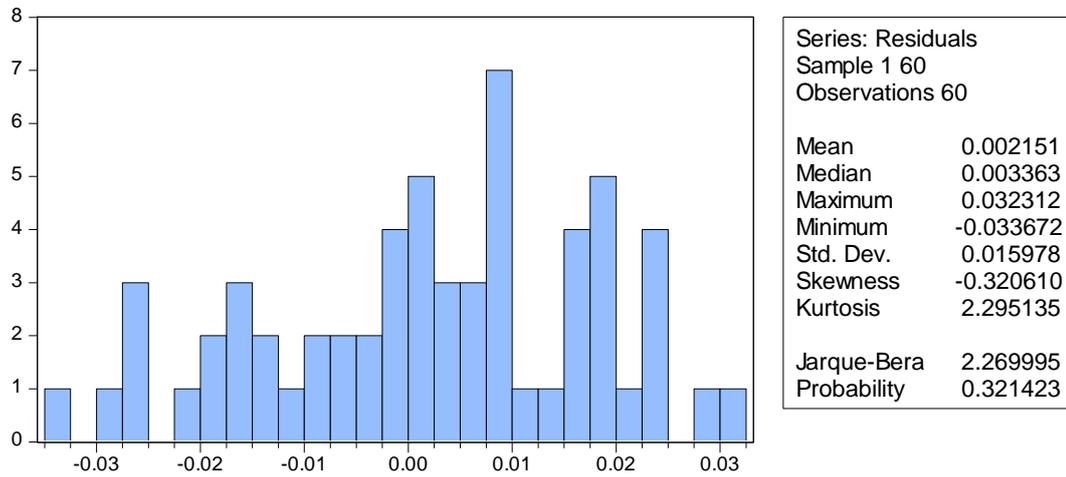
Tabulasi Data

Tahun	Bulan	Modal Kerja (Miliar Rupiah)	DPK (Miliar Rupiah)	NPF (%)	CAR (%)	FDR (%)	INFLASI (%)	SBIS (Miliar Rupiah)
2015	Jan	62011	11730009	5,56	14,16	93,60	6,96	8050
	Feb	62212	11782327	5,83	14,38	89,37	6,29	9040
	Mar	60613	11905344	5,49	14,43	89,15	6,38	8810
	April	61482	11901156	5,20	14,50	89,57	6,79	9130
	Mei	62163	11927813	5,44	14,37	90,05	7,15	8858
	Juni	63558	11960189	5,09	14,09	92,56	7,26	8458
	Juli	62983	11957348	5,30	14,46	90,13	7,26	8163
	Aug	62957	12097005	5,30	15,05	90,72	7,18	8585
	Sept	64048	12986843	5,14	15,14	90,82	6,83	7720
	Okt	63011	13302789	5,16	14,95	90,67	6,25	7192
	Nov	62767	15220941	5,13	15,31	90,26	4,89	6495
	Des	63640	15476183	4,84	15,01	88,03	3,35	6280
2016	Jan	62233	15655195	5,46	15,11	87,86	4,14	6275
	Feb	61765	15820863	5,59	15,44	87,30	4,42	7188
	Mar	62547	15514846	5,35	14,90	87,52	4,45	6994
	April	62383	15157133	5,48	15,43	88,11	3,60	7683
	Mei	63358	15370111	6,17	14,78	89,31	3,33	7225
	Juni	65049	14986106	5,68	14,72	89,32	3,45	7470
	Juli	63882	15151340	5,32	14,86	87,58	3,21	8130
	Aug	63646	15173755	5,55	14,87	87,53	2,79	8947
	Sept	65907	17781110	4,67	15,43	86,43	3,07	9442
	Okt	67167	17781110	4,80	15,27	86,88	3,31	10335
	Nov	67557	18171957	4,68	15,78	86,27	3,58	11042
	Des	68420	18543305	4,42	16,63	85,99	3,02	10788
2017	Jan	65213	17427336	4,72	16,99	84,74	3,49	11878
	Feb	65480	18990297	4,78	17,04	83,78	3,83	12683
	Mar	67136	19231378	4,61	16,98	83,53	3,61	12273
	April	66288	19459357	4,20	16,91	81,36	4,17	11533
	Mei	67872	19654790	4,75	16,88	81,96	4,33	10446
	Juni	70753	19864575	4,47	16,42	82,69	4,37	9421

	Juli	68924	19951875	4,50	17,01	80,51	3,88	10966
	Aug	70100	20330672	4,49	16,42	81,78	3,82	11716
	Sept	71520	20611024	4,41	16,16	80,12	3,72	12626
	Okt	70661	20864927	4,91	16,14	80,94	3,58	11555
	Nov	70304	19201670	5,27	16,46	80,07	3,30	10387
	Des	72188	21338958	4,77	17,91	79,65	3,61	10017
2018	Jan	69340	21622178	5,21	18,05	77,93	3,25	12272
	Feb	69640	21788306	5,21	18,62	78,35	3,18	12717
	Mar	71759	21979384	4,56	18,47	77,63	3,40	12997
	April	72461	22308651	4,84	17,93	78,05	3,41	13737
	Mei	73079	22355312	4,86	19,04	79,65	3,23	12807
	Juni	71475	22447445	3,83	20,59	78,68	3,12	11967
	Juli	71490	22687692	3,92	20,41	79,45	3,18	11312
	Aug	71939	22546733	3,95	20,46	78,95	3,20	10312
	Sept	71917	23041972	3,82	21,25	79,17	2,88	10652
	Okt	71439	23472129	3,95	21,22	79,69	3,16	8973
	Nov	71693	23778680	3,93	21,39	78,53	3,23	8526
	Des	72425	24067983	3,26	20,39	77,92	3,13	8268
2019	Jan	70964	24313460	3,39	20,25	77,92	2,82	5705
	Feb	71323	24530119	3,44	20,30	77,52	2,57	6935
	Mar	73099	24730868	3,44	19,85	78,38	2,48	7750
	April	73493	25030817	3,58	19,61	79,57	2,83	7130
	Mei	75672	24845907	3,49	19,62	82,01	3,32	7185
	Juni	77491	25287577	3,36	19,56	79,74	3,28	6990
	Juli	76348	25615145	3,36	19,72	79,90	3,32	6800
	Aug	75723	25906278	3,44	20,36	80,85	3,49	6425
	Sept	77988	26200227	3,32	20,39	81,56	3,39	6395
	Okt	78341	26300539	3,49	20,54	79,10	3,13	5290
	Nov	77758	26481233	3,47	20,48	80,06	3,00	5910
	Des	79986	26553798	3,23	20,59	77,91	2,72	7200

Lampiran 2

Hasil Uji Normalitas



Lampiran 3

Hasil Uji Autokorelasi Sebelum Perbaikan

Dependent Variable: LN_MODAL_KERJA

Method: Least Squares

Date: 11/26/20 Time: 13:06

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.656317	0.884108	6.397764	0.0000
LN_DPK	0.323225	0.057123	5.658376	0.0000
LN_CAR	-0.042773	0.082957	-0.515607	0.6083
LN_FDR	0.052647	0.172941	0.304422	0.7620
LN_NPF	-0.070588	0.043462	-1.624111	0.1103
LN_SBIS	0.000472	0.016608	0.028440	0.9774
LN_INFLASI	0.068640	0.020866	3.289599	0.0018
R-squared	0.906801	Mean dependent var		11.13392
Adjusted R-squared	0.896250	S.D. dependent var		0.074865
S.E. of regression	0.024114	Akaike info criterion		-4.502739
Sum squared resid	0.030820	Schwarz criterion		-4.258398
Log likelihood	142.0822	Hannan-Quinn criter.		-4.407164
F-statistic	85.94568	Durbin-Watson stat		0.740680
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 4

Hasil Uji Autokorelasi setelah Perbaikan

Dependent Variable: LN_MODAL_KERJA

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)

Date: 11/26/20 Time: 11:27

Sample: 1 60

Included observations: 60

Convergence achieved after 26 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.699571	1.056752	7.286073	0.0000
LN_DPK	0.176550	0.062496	2.824989	0.0067
LN_CAR	-0.187061	0.090878	-2.058383	0.0447
LN_FDR	0.247032	0.144596	1.708434	0.0936
LN_NPF	-0.090261	0.028412	-3.176891	0.0025
LN_SBIS	-0.011577	0.020532	-0.563842	0.5753
LN_INFLASI	-0.008654	0.027693	-0.312496	0.7559
AR(1)	0.973324	0.050110	19.42370	0.0000
SIGMASQ	0.000256	6.90E-05	3.703716	0.0005
R-squared	0.953613	Mean dependent var		11.13392
Adjusted R-squared	0.946337	S.D. dependent var		0.074865
S.E. of regression	0.017343	Akaike info criterion		-5.084731
Sum squared resid	0.015339	Schwarz criterion		-4.770579
Log likelihood	161.5419	Hannan-Quinn criter.		-4.961849
F-statistic	131.0570	Durbin-Watson stat		2.078476
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.97			

Lampiran 5

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.701761	Prob. F(6,53)	0.6494
Obs*R-squared	4.415860	Prob. Chi-Square(6)	0.6206
Scaled explained SS	3.199575	Prob. Chi-Square(6)	0.7834

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 11/26/20 Time: 13:05

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.198686	0.334122	-0.594652	0.5546
LN_DPK	0.007032	0.021588	0.325735	0.7459
LN_CAR	-0.028920	0.031351	-0.922458	0.3605
LN_FDR	-0.054757	0.065358	-0.837804	0.4059
LN_NPF	-0.008687	0.016425	-0.528879	0.5991
LN_SBIS	0.003345	0.006277	0.532869	0.5964
LN_INFLASI	0.006856	0.007886	0.869384	0.3886
R-squared	0.073598	Mean dependent var		0.013284
Adjusted R-squared	-0.031278	S.D. dependent var		0.008974
S.E. of regression	0.009113	Akaike info criterion		-6.448886
Sum squared resid	0.004402	Schwarz criterion		-6.204546
Log likelihood	200.4666	Hannan-Quinn criter.		-6.353311
F-statistic	0.701761	Durbin-Watson stat		1.859361
Prob(F-statistic)	0.649397			

Lampiran 6

Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 11/26/20 Time: 13:05

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.116725	442.2620	NA
LN_DPK	0.003906	431.2172	1.553248
LN_CAR	0.008259	11.58824	1.422928
LN_FDR	0.020908	1.867181	1.456721
LN_NPF	0.000807	4.824837	1.324670
LN_SBIS	0.000422	13.29328	1.165976
LN_INFLASI	0.000767	4.876522	1.659985
AR(1)	0.002511	1.492708	1.445458
SIGMASQ	4.76E-09	1.259609	1.257664

Lampiran 7

Hasil Uji Regresi sebelum Perbaikan

Dependent Variable: LN_MODAL_KERJA

Method: Least Squares

Date: 11/26/20 Time: 13:06

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.656317	0.884108	6.397764	0.0000
LN_DPK	0.323225	0.057123	5.658376	0.0000
LN_CAR	-0.042773	0.082957	-0.515607	0.6083
LN_FDR	0.052647	0.172941	0.304422	0.7620
LN_NPF	-0.070588	0.043462	-1.624111	0.1103
LN_SBIS	0.000472	0.016608	0.028440	0.9774
LN_INFLASI	0.068640	0.020866	3.289599	0.0018
R-squared	0.906801	Mean dependent var		11.13392
Adjusted R-squared	0.896250	S.D. dependent var		0.074865
S.E. of regression	0.024114	Akaike info criterion		-4.502739
Sum squared resid	0.030820	Schwarz criterion		-4.258398
Log likelihood	142.0822	Hannan-Quinn criter.		-4.407164
F-statistic	85.94568	Durbin-Watson stat		0.740680
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 8

Hasil Uji Regresi setelah Perbaikan

Dependent Variable: LN_MODAL_KERJA
 Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
 Date: 11/26/20 Time: 11:27
 Sample: 1 60
 Included observations: 60
 Convergence achieved after 26 iterations
 Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.699571	1.056752	7.286073	0.0000
LN_DPK	0.176550	0.062496	2.824989	0.0067
LN_CAR	-0.187061	0.090878	-2.058383	0.0447
LN_FDR	0.247032	0.144596	1.708434	0.0936
LN_NPF	-0.090261	0.028412	-3.176891	0.0025
LN_SBIS	-0.011577	0.020532	-0.563842	0.5753
LN_INFLASI	-0.008654	0.027693	-0.312496	0.7559
AR(1)	0.973324	0.050110	19.42370	0.0000
SIGMASQ	0.000256	6.90E-05	3.703716	0.0005
R-squared	0.953613	Mean dependent var		11.13392
Adjusted R-squared	0.946337	S.D. dependent var		0.074865
S.E. of regression	0.017343	Akaike info criterion		-5.084731
Sum squared resid	0.015339	Schwarz criterion		-4.770579
Log likelihood	161.5419	Hannan-Quinn criter.		-4.961849
F-statistic	131.0570	Durbin-Watson stat		2.078476
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.97			